



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR**H. MUSA AHMAD, S.Sos.**Bupati Lampung Tengah
Periode 2021 - 2026

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se-Kabupaten Lampung Tengah, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai media pertanggungjawaban atas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai sarana untuk mengevaluasi capaian kinerja pemerintah secara berkelanjutan, sehingga laporan kinerja ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Secara umum Laporan Kinerja (Lkj) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 ini memuat informasi tentang Perencanaan dan Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Periode 2021-2026, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis serta juga memuat pertanggung jawaban aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 serta dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja di tahun mendatang, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

PARAF HIERARKIS	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Manajemen Organisasi	
Manajemen	

Gunung Sugih, 22 Maret 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


MUSA AHMAD

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 ini merupakan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai perwujudan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah **“MEWUJUDKAN RAKYAT LAMPUNG TENGAH BERJAYA”**,

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa;

3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan;
4. Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah;
5. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2021, maka dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sebagai berikut :

Misi 1, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Indek Pembangunan Gender pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 90,27 persen dengan realisasi sebesar 90,27 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen.
- Presentase cabang olahraga yang berprestasi pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 17,86 persen dengan realisasi sebesar 0 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 0 persen. Hal ini dikarenakan situasi pandemic *Covid-19* banyak penyelenggaraan dan *event* olahraga tidak dilaksanakan, sehingga Kabupaten Lampung Tengah tidak mengirimkan utusan dan perwakilan untuk tingkat Nasional maupun Internasional.
- Lama harapan sekolah pada Tahun 2021 ditargetkan 12,28 persen dengan realisasi sebesar 12,93 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,29 persen.
- Usia Harapan hidup pada Tahun 2021 ditargetkan 69,94 tahun. Realisasi sebesar 69,87 tahun atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,90 persen.
- Prevalensi stunting pada tahun 2021 ditargetkan menurun menjadi sebesar 12,7 persen dengan realisasi 6,3 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 150,39 persen.

- laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 0,66 persen dengan realisasi sebesar 1,59 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 240,91 persen.

Misi 2, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Keberhasilan pembangunan dibidang prasarana jalan dilihat dari jalan kabupaten yang kondisinya baik. Prosentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 63,5 persen dengan realisasi sebesar 61,50 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96,85 persen.
- Prosentase Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 88,36 persen dengan realisasi sebesar 88,36 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.
- Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 83 persen dengan realisasi sebesar 58 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 69,88 persen.
- Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 0,58 dengan realisasi sebesar 0,57 atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,28 persen.
- Prosentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2 pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 94,26 persen dengan realisasi sebesar 72,60 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 77,02 persen.
- Jumlah prosentase luas kawasan kumuh pada tahun 2021 ditargetkan menurun menjadi sebesar 52,33 persen dengan realisasi sebesar 7,79 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 185,11 persen.
- Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2021 ditargetkan menurun menjadi sebesar 23,74 persen dengan realisasi sebesar

5,51 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 176,79 persen.

- Prosentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman pada tahun 2021 ditargetkan meningkat menjadi sebesar 89,6 persen dengan realisasi sebesar 89,88 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,31 persen.
- Prosentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman pada tahun 2021 ditargetkan meningkat menjadi 89.6 persen dengan realisasi sebesar 89,88 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,31 persen.
- Indeks kualitas air di Tahun 2021 ditargetkan 58,34 IKA dengan realisasi sebesar 56,67 IKA atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 97,14 persen.
- Indeks kualitas udara di Tahun 2021 ditargetkan 83,98 IKU dengan realisasi sebesar 83,46 IKU atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 99,38 persen.
- Indeks tutupan lahan di Tahun 2021 ditargetkan 26,86 TL dengan realisasi sebesar 24,48 TL atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 91,14 persen.
- Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang pada tahun 2021 ditargetkan meningkat menjadi 78 persen dengan realisasi sebesar 73,4 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 94,10 persen.

Misi ke-3, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Score PPH (Pola Pangan Harapan) pada tahun 2021, ditargetkan 86,1 persen dengan realisasi sebesar 87,5 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101,62 persen.
- Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan, perikanan pada tahun 2021 ditargetkan mencapai 36.4 persen dengan

realisasi sebesar 0,8 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 2,19 persen.

- Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan pada tahun 2021 ditargetkan mencapai 10 persen dengan realisasi sebesar 3,68 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 36,8 persen.
- Pertumbuhan ekonomi sektor industri non migas pada tahun 2021 ditargetkan mencapai 22,9 persen dengan realisasi sebesar 2,88 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 12,57 persen.
- Prosentase peningkatan volume usaha koperasi pada tahun 2021 ditargetkan mencapai 20 persen dengan realisasi sebesar 46 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 230 persen.
- Rasio Kemandirian Fiskal pada tahun 2021 ditargetkan 7,29 persen dengan realisasi sebesar 9,47 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 129,90 persen.
- Prosentase peningkatan nilai investasi pada tahun 2021 ditargetkan 10 persen dengan realisasi sebesar 9 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 90 persen.
- Indeks desa membangun pada tahun 2021 ditargetkan 0,714 dengan realisasi sebesar 0,707 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,02 persen.
- Prosentase tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2021 ditargetkan 73,48 persen dengan realisasi sebesar 50 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 68.04 persen.
- Prosentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1 pada tahun 2021 ditargetkan 4 persen dengan realisasi sebesar 5,4 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 135 persen.

Misi ke 4, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pada tahun 2021 jumlah kejadian konflik sosial ditargetkan sebesar 0 kasus dengan realisasi sebanyak 0 kasus dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.

- Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda Tahun 2021 ditargetkan 10 persen, realisasi sebesar 12 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 120 persen.
- Indeks resiko bencana di Tahun 2021 ditargetkan 72,16 persen dengan realisasi sebesar 38,50 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 146,65 persen.

Misi ke 5, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2021 ditargetkan mendapatkan WTP dengan realisasi WTP atau dengan nilai capaian kinerja 100 persen.
- Indeks SPBE di Tahun 2021 ditargetkan 2 dengan realisasi sebesar 1,68 atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 84 persen.
- Nilai akuntabilitas kinerja adalah nilai hasil evaluasi atas laporan kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Tahun 2021 ditargetkan nilai B dengan realisasi nilai B atau dengan nilai capaian kinerja 100 persen.
- Indeks inovasi daerah di Tahun 2021 ditargetkan mendapatkan predikat inovatif, dengan realisasi inovatif atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen.
- Indeks profesionalitas ASN di Tahun 2021 ditargetkan 56 dengan realisasi sebesar 46,11 atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 82,34 persen.
- Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 ditargetkan mendapatkan nilai 85,01 dengan realisasi nilai 85,15 atau dengan nilai capaian kinerja 100,16 persen.

Secara umum keseluruhan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 telah berhasil dicapai dan sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun didalam pelaksanaan masih dijumpai permasalahan dan kendala, namun secara umum dapat diatasi secara bijaksana sehingga tidak menimbulkan pengaruh

yang berarti dalam pencapaian target sasaran tersebut. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang mungkin timbul pada Tahun yang akan datang, telah dilakukan langkah-langkah antisipasi terutama meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program, baik dengan perangkat daerah di tingkat kabupaten maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat.

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, semoga dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB. I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1-1
2. Dasar Hukum	I-3
3. Maksud dan tujuan	I-5
4. Kondisi Geografis Daerah	I-6
5. Kondisi Umum Demografi.....	I-12
6. Kondisi Ekonomi.....	I-13
7. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.....	I-17
8. Isu-Isu Strategis.....	I-18
9. Sistematika Laporan.....	I-27
BAB. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021	
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2021-2026	II-29
2. Penetapan Kinerja Tahun 2021	II-54
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
1. Capaian Kinerja.....	III-60
1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021...	III-60
1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.....	III-78
1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja	

Dengan Target Jangka Menengah.....	III-83
1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional.....	III-87
1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	III-99
1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-106
1.7 Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	III-112
2. Realisasi Anggaran.....	III-117

BAB. IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	IV-129
2. Saran-Saran	IV-130

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Jumlah Kampung/Kelurahan, Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021	I-9
Tabel 1.2	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2021 (<i>Milyar Rupiah</i>)	I-18
Tabel 1.3	PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2021 (<i>Milyar Rupiah</i>)	I-19
Tabel 1.4	Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2021 (Persen)	I-20
Tabel 3.1	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi I Tahun 2021	III-60
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi II Tahun 2021	III-64
Tabel 3.3	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi III Tahun 2021	III-69
Tabel 3.4	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi IV Tahun 2021	III-74
Tabel 3.5	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi V Tahun 2021	III-76
Tabel 3.6	Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi I	III-78
Tabel 3.7	Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi II	III-79
Tabel 3.8	Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi III	III-80
Tabel 3.9	Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi IV	III-82
Tabel 3.10	Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi V	III-82
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RPJMD	III-83

Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional	III-87
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021	III-107
Tabel 3.14	Tingkat Efiseinsi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja Tahun 2021	III-111
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Misi I Tahun 2021	III-117
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Misi II Tahun 2021	III-119
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Misi III Tahun 2021	III-121
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Misi IV Tahun 2021	III-125
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Misi V Tahun 2021	III-127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu Tahun Anggaran. Laporan Kinerja (LKj), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal Tahun Anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah

dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun LKj Tahunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara No.091), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor: 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3825);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021 ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2021 kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
2. Laporan kemajuan (*Progress Report*) secara nyata, jelas, dan transparan atas pelaksanaan program kerja/ kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan tolok ukur Renstra/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
3. Bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan program kerja guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.4. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

1.4.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 April 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Bersamaan dengan pembentukan tersebut, juga terjadi perpindahan Ibu Kota dari Metro ke Gunung Sugih. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1999 ini, luas Kabupaten Lampung Tengah menjadi 3.802,68 Km².

Berdasarkan hasil survey Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) sekarang berubah menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2002 yang meliputi pendataan seluruh wilayah kecamatan, diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah 4.659,37 Km². Kemudian berdasarkan hasil survey ulang oleh BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008 dalam kegiatan penyusunan Sistem Informasi Geografis Sumber Daya Alam, dilakukan koreksi terhadap luas Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh BAKOSURTANAL tersebut, sehingga Kabupaten Lampung Tengah mempunyai luas wilayah 4.789,82 Km². Data inilah yang selanjutnya digunakan oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah dalam dokumen-dokumen dan publikasi resmi.

Selanjutnya berdasarkan kebijakan Penggunaan Satu Sumber Peta (*One Map Policy*), disyaratkan penggunaan Peta Batas Administrasi yang bersumber dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (PPBW-BIG) dalam penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan peta tersebut dilakukan perhitungan ulang menggunakan *Software SIG* sehingga diperoleh luas areal Kabupaten Lampung Tengah adalah **454.550,04 Ha** atau **4.545,50 Km²** yang dipakai saat ini sebagai luas administrasi secara resmi.

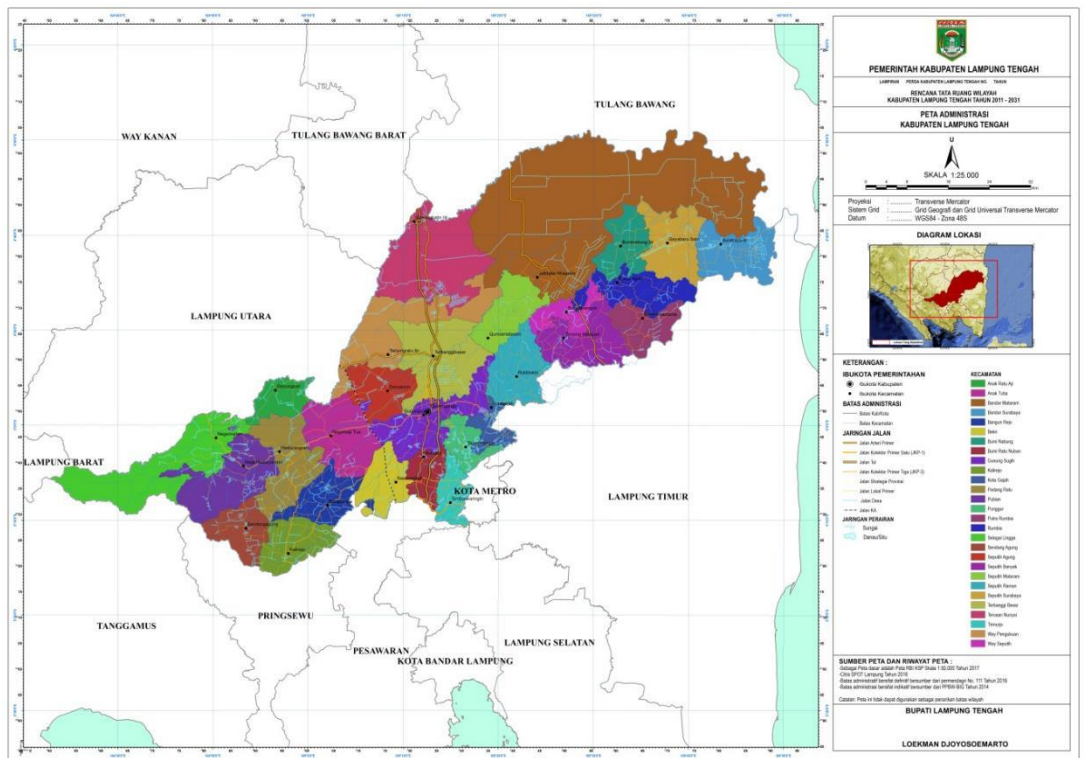
Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak di antara 104°35' sampai dengan 105°50' Bujur Timur dan 4°30" sampai dengan 4°15' Lintang Selatan dengan ibukota di Kota Gunung Sugih.

Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan dan 301 kampung, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Utara.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Selatan.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung (13,57 persen dari total luas wilayah Provinsi Lampung). Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas sebesar 101.789,15 hektar sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Bumi Ratu Nuban seluas 6.370,67 Ha.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Tabel 1.1
Jumlah Kampung/Kelurahan, Luas Wilayah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/Kel	
			km ²	%	Kampung	Kelurahan
1	Padang Ratu	Haduyang Ratu	164,00	3,61	15	-
2	Anak Ratu Aji	Gedung Sari	70,22	1,54	6	-
3	Selagai Lingga	Negri Katon	272,63	6,00	14	-
4	Pubian	Negri Kepadungan	187,40	4,12	20	-
5	Anak Tuha	Negara AjiTua	162,68	3,58	12	-
6	Kalirejo	Kalirejo	111,90	2,46	17	-
7	Sendang Agung	Sendang Agung	97,90	2,15	9	-
8	Bangun Rejo	Bangun Rejo	104,88	2,31	17	-
9	Gunung Sugih	Gunung Sugih	164,01	3,61	11	4
10	Bekri	Kusumadadi	94,15	2,07	8	-
11	BumiRatu Nuban	Bulusari	63,71	1,40	10	-
12	Trimurjo	Simbarwaringin	64,18	1,41	11	3
13	Punggur	Tanggul Angin	60,70	1,34	9	-
14	Kota Gajah	Kota Gajah	46,90	1,03	7	-
15	Seputih Raman	Rukti Harjo	130,00	2,86	14	-
16	Terbanggi Besar	Terbanggi Besar	217,15	4,78	7	3
17	Seputih Agung	Dono Arum	106,96	2,35	10	-
18	Way Pengubuan	Tanjung Ratu Ilir	214,48	4,72	8	-
19	Terusan Nunyai	Gunung Batin Ilir	289,69	6,37	7	-
20	Spt. Mataram	Kurnia Mataram	115,96	2,55	12	-
21	Bdr. Mataram	Jati Datar	1.017,89	22,39	9	-
22	Spt. Banyak	Tanjung Harapan	136,62	3,01	13	-
23	Way Seputih	Suko Binangun	62,34	1,37	6	-
24	Rumbia	Reno Basuki	118,39	2,60	9	-
25	Bumi Nabung	Bumi Nabung Ilir	97,75	2,15	7	-
26	Putra Rumbia	Binakarya Utama	93,38	2,05	10	-
27	Spt.Surabaya	Gaya Baru Satu	141,55	3,11	13	-
28	Bdr.Surabaya	Surabaya Ilir	138,09	3,04	10	-
	Jumlah		4.545,50	100,0	301	10

Sumber data: Revisi RTRW KAbupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

1.4.2.Kondisi Topografi

Secara Topografi Lampung Tengah dapat dibagi 5 (lima) bagian yaitu :

- Daerah Topografi Berbukit sampai Bergunung.
Daerah ini terdapat di Kecamatan Selagai Lingga dengan ketinggian rata-rata 1.600 mdpl.
- Daerah Topografi Berombak sampai Bergelombang.
Ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran-dataran sempit, dengan kemiringan antara 8%-15% dan ketinggian antara 300-500 mdpl.
- Daerah Dataran Aluvial.
Dataran ini sangat luas, meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besar seperti Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25-75 mdpl dengan kemiringan 0%-3%.
- Daerah Rawa Pasang Surut.
Daerah ini terletak di sebelah timur Kabupaten Lampung Tengah, mempunyai ketinggian antara 0,5-1 mdpl
- Daerah River Basin.
Kabupaten Lampung Tengah memiliki 3 dari 5 DAS di Provinsi Lampung yaitu sebagian besar adalah DAS Way Seputih dan sebagian kecil adalah DAS Way Sekampung di Kecamatan Selangai Lingga.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah berada pada ketinggian 15-65 meter dpl dan mempunyai kemiringan lereng antara 0-2% (92,29%). Keadaan lereng bervariasi, mulai datar, landai, miring, dan terjal, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- Lereng 0-2%, terletak pada ketinggian 50 meter dpl yang hampir tersebar di seluruh wilayah (92,16%).
- Lereng 2-15%, terletak pada ketinggian 50-100 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga dan Sendang Agung.
- Lereng 15-40%, terletak pada ketinggian 100-500 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.
- Lereng diatas 40%, terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dpl yang tersebar hanya di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.

Berdasarkan karakteristik topografi tersebut, maka wilayah tanah usaha di Kabupaten Lampung Tengah dikelompokkan menjadi 5 golongan yaitu:

- ***Tanah Usaha Khusus I.***

Tanah usaha ini terletak pada ketinggian 0 – 7 m dpl yang tersebar di daerah-daerah pertemuan air. Sebagian besar daerah ini tergenang air secara periodik atau terus-menerus tergantung pada besar kecilnya volume air yang tertampung di tempat tersebut.

- ***Tanah Usaha Utama IA dan B***

Terletak pada ketinggian 7-40 m dpl yang dipergunakan untuk bendungan-bendungan besar

dan pada ketinggian ini sebagian besar digunakan untuk usaha pertanian sawah.

- ***Tanah Usaha Utama IC***

Terletak pada ketinggian 50-100 m dpl, yang merupakan daerah persawahan yang relatif baik, akan tetapi biasanya daerah yang bisa diairi relatif berkurang.

- ***Tanah Usaha Utama ID***

Terletak pada ketinggian 100-500 m dpl dengan permukaan yang sudah agak bergelombang.

- ***Tanah Usaha Utama II***

Terletak pada ketinggian 500-1000 m dpl yang merupakan daerah peralihan antara daerah yang beriklim panas dengan yang beriklim sedang.

1.5. KONDISI UMUM DEMOGRAFI

1.5.1. Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2021 berjumlah 1.477.395 jiwa. Data ini meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2020 yang berjumlah 1.460.045 jiwa. Komposisi penduduk Tahun 2021 yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 755.635 jiwa dan perempuan sebanyak 712.760 jiwa.

1.5.2. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2015-2020 mengalami kemajuan yang signifikan, dengan pertumbuhan IPM pada periode Tahun 2015-2020

sebesar 3,77 persen dari sebesar 67,61 pada tahun 2015 menjadi 70,16 pada tahun 2020 (meningkat 2,55 poin). Pada tahun 2020 status indeks pembangunan manusia Kabupaten Lampung Tengah sudah berstatus “tinggi” yaitu 70,16, dan berada di atas Provinsi yang berstatus “sedang” yaitu 69,69I namun masih di bawah Nasional yaitu 71,94. Dalam lingkup Kabupaten, IPM Kabupaten Lampung Tengah merupakan IPM tertinggi (70,16) di Provinsi Lampung. Sedangkan dalam lingkup Kabupaten/Kota, IPM Kabupaten Lampung Tengah merupakan IPM tertinggi ketiga (70,16) di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Berdasarkan hasil perhitungan IPM pada Tahun 2021 Kabupaten Lampung Tengah nilai IPM 70.23. Dengan rincian Usia Harapan Hidup 69,87 Tahun, Harapan Lama Sekolah 12,93 Tahun, Rata-Rata Lama Sekolah 7,59 Tahun dan Pengeluaran Per Kapita Rp 11.259 juta.

1.6. KONDISI EKONOMI

1.6.1. Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi lahan basah 77.721 Ha dan potensi lahan kering yang cocok untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura 144.049 Ha.

Berdasarkan Angka Sementara Dinas Pertanian TPH Lampung Tengah pada Tahun 2021 luas lahan padi seluas 112.026 Ha dengan jumlah produksi sebesar 490.309,07 ton, luas lahan jagung seluas 76.499,60 Ha

dengan jumlah produksi sebesar 391.838,17 ton, Ubi Kayu dengan luas lahan seluas 65.159,06 Ha dengan jumlah produksi sebesar 2.089.369,82 ton.

1.6.2. Perkebunan

Komoditas perkebunan yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Tengah diantaranya komoditas kelapa sawit, kelapa, kakao, dan kopi.

Pada Tahun 2021 luas areal tanaman kelapa sawit sebesar 19.178 Ha dengan total produksi sebesar 43.095 ton, kelapa dalam luas areal sebesar 6.993 Ha dengan total produksi sebesar 6.259 ton, kakao luas areal sebesar 5.275 Ha dengan total produksi sebesar 3.015 ton, karet dengan luas areal sebesar 11.548 Ha dengan total produksi sebesar 4.923 ton, tebu dengan luas areal sebesar 10.183 Ha dengan total produksi sebesar 65.246 ton, lada dengan luas areal sebesar 162 Ha dengan total produksi sebesar 105 ton, selain hasil perkebunan rakyat tersebut, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat perusahaan besar yang bergerak dibidang perkebunan seperti PTP Nusantara VII yang bergerak pada tanaman sawit, Gunung Madu Plantation, Gula Putih Mataram yang bergerak pada tanaman tebu dan gula.

1.6.3. Peternakan

Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan ternak besar maupun kecil.

Untuk pengembangan ternak besar seperti sapi, kerbau maupun kambing potensi ketersediaan pakan cukup besar seperti rumput, limbah nenas, daun jagung, kulit kakao maupun pucuk daun tebu serta jerami padi. Sebagai gambaran pengembangan ternak di Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2021 populasi sapi sebanyak 343.309 ekor, kambing dan domba 290.970 ekor, ayam buras 1.033.369 ekor, ayam ras pedaging 1.136.765 ekor, dan ayam ras petelur 1.956.182 ekor.

1.6.4.Perikanan

Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan perikanan seperti kolam, perairan umum, perairan laut, keramba, mina padi maupun tambak. Potensi tersebut dapat dilihat dari jumlah produksi perikanan di Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2021 mencapai 48.764 ton.

1.6.5.Perindustrian

Potensi bidang industri di Kabupaten Lampung Tengah cukup besar, hal ini karena didukung oleh ketersediaan potensi bahan baku yang cukup terutama industri yang bergerak pada bidang agribisnis, sampai dengan Tahun 2020 jumlah unit usaha industri sebanyak 1673 unit. dengan total investasi sebesar Rp.1.668.718.717.734,- milyar.

1.6.6. Perdagangan dan Jasa

Potensi bidang perdagangan dan jasa di Kabupaten Lampung Tengah cukup menjanjikan mengingat letak geografis Kabupaten Lampung Tengah yang cukup strategis, berada ditengah-tengah Propinsi Lampung serta dilintasi oleh Jalan Lintas Trans Sumatera. Selain itu telah dikembangkan kawasan niaga terpadu yang diharapkan dapat menarik investasi dibidang perdagangan dan jasa sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah agar lebih berkembang, serta didukung oleh pusat-pusat perdagangan dan jasa pada masing-masing kecamatan seperti pasar daerah, pasar kampung dan kios serta toko-toko yang semakin berkembang. Sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan SIUP yang telah diterbitkan jumlah usaha perdagangan mencapai 1.418 unit.

Pada Tahun 2021 jumlah investasi Penanaman modal yang berkembang di Kabupaten Lampung Tengah mencapai Rp 14.204.492.171.158 atau mengalami peningkatan sebesar 4,60 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp.13.580.010.671.158, selain itu dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh sektor perbankan yang semakin berkembang baik bank nasional, bank daerah, maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1.6.7. Pertambangan

Sesuai dengan formasi geologi dan jenis tanah yang ada, maka Kabupaten Lampung Tengah memiliki deposit mineral yang potensial untuk pengembangan usaha pertambangan terutama bahan tambang galian C. Potensi pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah diantaranya marmer, granit, andesit, felspart, pasir, diorit, Batu Kapur, Lempung, Pasir Kuarsa dan Pasir Batu (Sirtu).

1.7. PERTUMBUHAN EKONOMI/PDRB

1.7.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Tengah merupakan gambaran potensi wilayah Kabupaten Lampung Tengah sekaligus kemampuan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu proses produksi.

Berdasarkan harga berlaku PDRB Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan. Pada Tahun 2021 PDRB Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 74.336 (dalam milyar) atau meningkat dibanding Tahun 2020 yang sebesar Rp. 71.070 (dalam milyar).

Demikian juga berdasarkan harga konstan PDRB Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan, pada Tahun 2021 PDRB Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.48.710 (dalam milyar) atau menurun jika

dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 47.348 (dalam milyar).

Tabel 1.2
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 - 2021 (Milyar Rupiah).

Kategori	Uraian	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16 052	16 025
B	Pertambangan dan Penggalian	2 281	2235
C	Industri Pengolahan	10777	11443
D	Pengadaan Listrik dan Gas	60	62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17	19
F	Konstruksi	5 279	5 615
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4939	5120
H	Transportasi dan Pergudangan	1 274	1 305
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	464	457
J	Informasi dan Komunikasi	2051	2 182
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	747	765
L	Real Estate	909	927
M,N	Jasa Perusahaan	49	50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	750	779
P	Jasa Pendidikan	1 162	1 181
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	279	288
R,S,T,U	Jasa lainnya	258	257
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	47 348	48710

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah

Ket: *angka sementara

** angka sangat sementara

Tabel 1.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 - 2021 (Milyar Rupiah)

Kategori	Uraian	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25 180	25419
B	Pertambangan dan Penggalian	3658	3 649
C	Industri Pengolahan	16176	17560
D	Pengadaan Listrik dan Gas	74	80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26	28
F	Konstruksi	7 391	8137
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7 047	7468
H	Transportasi dan Pergudangan	1 855	1 952
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	788	782
J	Informasi dan Komunikasi	2 488	2 589
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 156	1 237
L	Real Estate	1 345	1 392
M,N	Jasa Perusahaan	82	85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 260	1311
P	Jasa Pendidikan	1 739	1817
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	417	440
R,S,T,U	Jasa lainnya	388	390
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	71070	74336

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah

Ket: *angka sementara

** angka sangat sementara

1.7.2. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha tahun 2021 di Kabupaten Lampung Tengah mencapai sebesar 2,88 persen.

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Kategori	Uraian	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,80	
B	Pertambangan dan Penggalian	3,31	2,00
C	Industri Pengolahan	-4,63	6,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,93	4,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,60	6,75
F	Konstruksi	-2,03	6,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,84	3,68
H	Transportasi dan Pergudangan	-4,21	2,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,16	2,00
J	Informasi dan Komunikasi	6,24	6,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,72	2,38
L	Real Estate	-3,08	2,00
M,N	Jasa Perusahaan	-1,49	1,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,09	3,89
P	Jasa Pendidikan	4,81	1,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,83	3,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	-4,21	
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-1,02	2,88

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah

Ket: *angka sementara

** angka sangat sementara

1.7.3. Pendapatan Perkapita

Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita penduduk pada setiap Tahunnya. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 sebesar Rp. 74.336 (dalam ribu rupiah), Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 sebesar Rp. 48.710 (dalam ribu rupiah), Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 sebesar Rp. 50.316 (dalam ribu rupiah).

1.8. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, dalam hal tersebut tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi baik itu persoalan maupun peluang atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat

kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah, sedangkan secara populis, penetapan isu strategis dapat merupakan kesepakatan multipihak dari sekian banyak *stakeholders*.

Berdasarkan penggabungan terhadap kedua pendekatan tersebut, di bawah ini akan diuraikan secara rinci tentang berbagai isu strategis baik dalam skala nasional, Provinsi Lampung maupun Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembangunan Kabupaten Lampung Tengah lima tahun mendatang. Perbandingan dan analisa isu strategis di bawah ini menunjukkan bahwa seluruh isu strategis yang dihadapi Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Lampung.

1.8.1. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Lampung Tengah mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2019 sebesar 5,46 %, diatas pertumbuhan ekonomi propinsi yang sebesar 5,25%, dan berada di atas Nasional (5,17%). Meski dengan capaian yang tinggi, pertumbuhan tersebut stagnan di angka 5% untuk 5 (lima) tahun ke belakang dan bahkan pada tahun 2020 mengalami kontraksi atau penurunan mencapai (-1,02%) yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

1.8.2. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Masih tingginya angka kemiskinan penduduk Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebesar 11,82 persen, atau jumlahnya mencapai 152.280 jiwa, Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Propinsi Lampung yang sebesar 12,34%. Angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah sedikit lebih baik, namun apabila dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 9,68%, Kabupaten Lampung Tengah masih yang masih ketinggalan.

Dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 berada di posisi 8 terendah angka penganggurannya dibandingkan 14 kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung, walaupun di tahun 2020 TPT Kabupaten Lampung Tengah mengalami posisi tertinggi sepanjang 4 tahun belakangan ini.

1.8.3. Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 terealisasi sebesar 70,16 masih dibawah IPM nasional tahun 2020 sebesar 71,94 meskipun berdasar diatas capaian provinsi Lampung sebesar 69,69 di tahun yang sama.

Kualitas pembangunan manusia dari sisi kesetaraan gender dapat diketahui dari pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pencapaian IPG di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan peningkatan dari sebesar 89,23 pada tahun 2017 menjadi 89,86 pada

tahun 2020. Kabupaten Lampung Tengah menempati ranking ke-5 di antara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

1.8.4. Tingginya Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas memuat kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan dan pemalsuan uang. Angka kriminalitas pada tahun 2020 mencapai 4,25 kasus per 10.000 penduduk. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat juga akan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi.

1.8.5. Belum Optimalnya Konektivitas Antar Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi pembangunan antar wilayah di Kabupaten Lampung Tengah sampai tahun 2020 belum merata. Dengan luas wilayah wilayah mencapai 4.546 km², dan secara administratif terbagi menjadi 28 kecamatan dengan 301 kampung dan 10

kelurahan, dalam hal bidang pembangunan infrastruktur jalan, dari total jalan kabupaten sepanjang 1.343,326 km, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 61,9% pada tahun 2020 atau masih terdapat sepanjang 511,612 km jalan dalam kondisi rusak. Begitu juga dengan tingkat aksesibilitas jalan kabupaten pada tahun 2020 sebesar 86,36%.

1.8.6. Belum Optimalnya Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Dasar

Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang layak, yang ditunjukkan oleh persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak dan aman di tahun 2019 adalah sebesar 88,12%. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi di tahun 2019 adalah sebesar 93,12%. Persentase rumah tidak layak huni di Tahun 2019 adalah sebesar 86,18%. Hal ini perlu terus diupayakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

1.8.7. Belum Optimalnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2020 di Kabupaten Lampung sebesar 59,43, mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin dari tahun 2019 sebesar 59,40 poin. Jika ditinjau dari komposit Indeks Kualitas Air dan Indeks kualitas tutupan lahan mengalami kenaikan akan tetapi indeks kualitas udara mengalami penurunan sebesar 2 poin dari tahun 2019 menjadi sebesar 84,35 poin. Hal ini perlu diupayakan lebih baik lagi agar indeks kualitas lingkungan hidup tersebut semakin meningkat.

1.8.8. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 sudah menunjukkan adanya kemajuan diantaranya diperolehnya opini BPK atas laporan keuangan daerah kategori WTP pada beberapa tahun ini, namun demikian masih ada beberapa penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal seperti pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang masih masih kategori B (63,52 poin). Kemudian reformasi birokrasi yang belum dilakukan evaluasi secara optimal, sehingga belum diketahui hasil penilaian reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu juga menurunnya penilaian atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari kategori tinggi menjadi sedang.

Tata kelola pemerintahan yang baik akan memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara tidak langsung tata kelola pemerintahan yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik perlu terus didorong dengan penerapan reformasi birokrasi yang merupakan upaya untuk perbaikan kinerja aparatur melalui penyederhanaan regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan

Reformasi birokrasi diarahkan pada pencapaian birokrasi yang bersih dan akuntabel. Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi baru mencapai predikat “B” nilai 63,52. Penilaian ini menunjukkan akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, baik pada tingkat kabupaten maupun perangkat daerah. Namun demikian perlu upaya peningkatan agar tidak tertinggal dibandingkan kabupaten/kota yang lain.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah selama 3 tahun terakhir tahun 2018 sampai tahun 2020 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Hasil ini perlu terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan, kapasitas pengelola keuangan dan auditor yang menunjang tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik, serta peningkatan manajemen pengelolaan aset daerah.

1.9. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah selama Tahun 2021. Capaian kinerja tersebut akan dibandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja dimungkinkan dapat diidentifikasinya sejumlah kendala dan permasalahan untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut ini.

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas/ ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi Anggaran.

Bab IV : Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

TAHUN 2021

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH TAHUN 2021 – 2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan sistem serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2030, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2021-2026 sebagai acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2021 – 2026 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka visi pembangunan lima tahun ke depan adalah **”Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”**.

Visi Rakyat Lampung Tengah **Berjaya** pada uraian visi pembangunan tersebut dimaksudkan sebagai kondisi sebagai berikut:

1. Pendidikan Berjaya

Makna Pendidikan Berjaya adalah terwujud dengan meningkatnya mutu pendidikan yang mampu menciptakan generasi cemerlang bagi pelajar, santri, dan mahasiswa.

2. Kesehatan Berjaya

Kesehatan Berjaya menunjukkan kehadiran dan kemampuan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, berbudaya, serta sehat jasmani dan rohani.

3. Pemuda Milenial Berjaya

Makna Pemuda Milenial Berjaya adalah mewujudkan generasi muda yang kreatif, inovatif, memiliki kompetensi, menguasai teknologi dalam menjawab tantangan dan peluang

4. SIJALU Berjaya

SIJALU merupakan akronim dari *Setiap Infrastruktur Jalan Mulus*. diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menghadirkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan alam dan keberlanjutan (*sustainability*). Kehadiran infrastruktur yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi pergerakan manusia, modal, barang/jasa, dan lain-lain di Kabupaten Lampung Tengah. Kehadiran infrastruktur yang berkualitas juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

5. Petani Berjaya

Petani Berjaya menunjukkan kemauan, kemampuan, dan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bercirikan sebagai masyarakat agraris di Kabupaten Lampung Tengah.

6. BUMKAM Berjaya

BUMKAM merupakan akronim dari Badan Usaha Milik Kampung. BUMKAM Berjaya terwujud dengan terbentuknya BUMKAM di setiap Kampung sebagai posos ekonomi kerakyatan dalam upaya menekan angka kemiskinan.

7. Keberagaman Umat Berjaya

Makna Keberagaman Umat Berjaya diartikan sebagai kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan rasa dan situasi aman dan damai bagi masyarakat pada khususnya dan umumnya bagi para *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah dan masyarakat menjamin keamanan dan kedamaian bagi semua pihak yang sedang berada, beraktifitas, dan berusaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

8. Pelayanan Berjaya

Makna Pelayanan Berjaya memberikan arti kemampuan unsur pemerintah dalam menghadirkan *good governance* bagi masyarakat dan bagi seluruh *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah. Segala bentuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan akan memenuhi standar dan unsur yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kondisi *good governance*.

Dalam rangka mewujudkan visi dan makna ‘berjaya’ di atas, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Misi ke-1: Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks

Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).

2. Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur).
3. Misi ke-3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).
4. Misi ke-4: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).
5. Misi ke-5: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

2.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi dan Arah kebijakan merupakan pedoman untuk pencapaian tujuan dan sasaran selama periode RPJMD (lima tahun), serta memandu dan menjelaskan pelaksanaan strategi selama periode perencanaan yang tertuang dalam Strategi dan Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai berikut:

I. Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks

Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).

Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan produktif.

Adapun sasaran dari tujuan ini adalah:

1. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender, prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan;
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan seta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah;
3. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan;
4. Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga.

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui, strategi :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak melalui pengarusutamaan hak anak dan perlindungan khusus anak;
2. Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor, wirausaha muda, dan Pramuka;

3. Membudayakan berolahraga agar dapat hidup sehat dan meningkatkan prestasi olahraga melalui pembibitan atlet peningkatan kompetensi atlet berbakat, pelatih dan wasit melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga;
4. Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan, dan mengoptimalkan pemanfaatan TI untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
5. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat;
6. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pengembangan seni dan budaya;
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat;
8. Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk melalui intensifikasi program Keluarga Berencana dan ketahanan keluarga.

II. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Adapun sasaran dari tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten;
3. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi;
4. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat;
5. Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui strategi:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, melalui pembangunan dan rehabilitasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih;
3. Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan;

4. Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi kewenangan Kabupaten;
5. Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur, pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh, dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru;
6. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; rehabilitasi rumah akibat korban bencana dan rumah yang terkena dampak program pemerintah;
7. Meningkatkan pengelolaan SDA lingkungan hidup sesuai daya dukung daya tampung;
8. Meningkatkan pengelolaan sampah dengan memperluas area pelayanan sampah, pengolahan sampah di TPA, dan pengurangan sampah (3R);
9. Meningkatkan koordinasi penataan ruang daerah.

III. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penanggulangan kemiskinan yang terpadu. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan;
2. Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat;
3. Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatnya Iklim Investasi Daerah;
5. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
6. Menurunnya angka pengangguran;
7. Meningkatnya penanganan kemiskinan.

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan strategi seperti :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, modernisasi pertanian, penguatan kapasitas sumber daya pertanian, serta penanganan bencana pertanian ;
2. Meningkatkan pengembangan ternak melalui penyediaan sarana dan prasarana peternakan, dan pemanfaatan teknologi peternakan, serta peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
3. Meningkatkan produktivitas perikanan melalui penerapan cara budidaya ikan yang baik, pendampingan pemasaran, industri pengolahan

perikanan, dan penyediaan sarana produksi perikanan;

4. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau;
5. Meningkatkan sarana distribusi perdagangan, mempermudah perijinan serta pendaftaran perusahaan perdagangan, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah;
6. Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat peetumbuhan ekonomi baru yang menyerap tenaga kerja local;
7. Meningkatkan kunjungan wisata dan Mengembangkan daerah tujuan wisata unggulan dan destinasi wisata baru, agrowisata dan ekowisata, serta infrastruktur pengembangan pariwisata;
8. Mendorong perkembangan IKM, UMKM, dan koperasi;
9. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
10. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam upaya peningkatan PAD melalui pembinaan exsisting BUMD dan atau pendirian BUMD baru;
11. Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan

peluang investasi, pemasaran investasi dan kemudahan perizinan berusaha di daerah;

12. Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMKam, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat Kampung, pengembangan Posyantek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah Kampung ;
13. Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja yang telah dibekali ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
14. Meningkatkan upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan/ hubungan industrial;
15. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

IV. Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas masyarakat. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial;
2. Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

3. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana..

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan strategi seperti :

1. Peningkatan kondusivitas daerah, pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk mengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat;
2. Meningkatkan pengendalian atas gangguan keamanan dan Ketertiban umum melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada, dan pembinaan PPNS;
3. Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana;

V. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik yang berkualitas. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel;

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan strategi seperti :

1. Meningkatkan pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas SDM perencana, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, perbaikan mekanisme perencanaan serta optimalisasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan;
3. Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan penelitian dan pengembangan dan penyelenggaraan kompetisi Iptek;
4. Meningkatkan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum melalui koordinasi, pemantauan, evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan kepala daerah ;
5. Pengembangan e-goverment untuk menunjang sistem pemerintahan yang terbuka (open goverment) dan pelayanan publik secara online yang andal, terpercaya serta terjangkau;
6. Meningkatkan keamanan informasi melalui pengembangan teknologi dan peningkatan kompetensi SDM persandian;

7. Peningkatan implementasi *single data* didukung teknologi informasi terintegrasi;
8. Meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
9. Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
10. Meningkatkan pengelolaan kearsipan melalui dan pengembangan sarana dan prasarana kearsipan;
11. Peningkatan kualitas pelayanan transmigran;
12. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung/kelurahan;
13. Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD sesuai standar operasional prosedur.

2.1.3. Program Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka dilakukan berbagai kebijakan dan program, diantaranya :

- 1. Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan misi 1 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui program, sebagai berikut :

• **Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan,** yang dilaksanakan melalui program:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
5. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha);
6. Program Perlindungan Khusus Anak;
7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
8. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
9. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

• **Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah,** yang dilaksanakan melalui program :

1. Program Pembinaan Perpustakaan;
2. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
3. Program Pengelolaan Pendidikan;
4. Program Pendidik dan tenaga pendidik;
5. Program Pengembangan Kebudayaan;

6. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.

- **Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan**, yang dilaksanakan melalui program :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

- **Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga**, yang dilaksanakan melalui program :

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan misi 2 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui program, sebagai berikut :

- **Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan**, yang dilaksanakan melalui program:

1. Program Penyelenggaraan Jalan;

2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
- **Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 2. Program Pengelolaan Perkeretaapian;
 - **Meningkatnya kualitas jaringan irigasi**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda).
 - **Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
 4. Program Penataan Bangunan Gedung;
 5. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
 6. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
 7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu).
 - **Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;

2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
 4. Program Pengendalian Bahan Berba-haya & Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berba-haya & Beracun (Limbah B3);
 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh);
 6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;
 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 10. Program Pengelolaan Persampahan
- **Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 3. Program Penyelesaian ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam misi 3 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui program, sebagai berikut :

- **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
 5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 9. Program Penyuluhan Pertanian;
 10. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 11. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

12. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
 13. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 14. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
 15. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
 16. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional;
 17. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 18. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
 19. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
 20. Program Pengembangan Ekspor;
 21. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
 22. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- **Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
 2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
 3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi;
 4. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;

6. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM).
- **Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 3. Program Pemasaran Pariwisata;
 4. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
 - **Meningkatnya Iklim Investasi Daerah**, yang dilaksanakan melalui program :
 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 2. Program Promosi Penanaman Modal;
 3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - **Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung**, yang dilaksanakan melalui program:
 1. Program Penataan Desa;
 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

- **Menurunnya angka pengangguran,** yang dilaksanakan melalui program:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Hubungan Industrial.

- **Meningkatnya penanganan kemiskinan,** yang dilaksanakan melalui program :

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Rehabilitasi Sosial;
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
4. Program Penanganan Bencana.

4. Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam misi 4 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui program, sebagai berikut :

- **Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;

3. Program pembudayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

- **Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yang dilaksanakan melalui program :**

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

- **Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, yang dilaksanakan melalui program:**

1. Program Penanggulangan Bencana;
1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

5. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam misi 5 sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui program, sebagai berikut :

- **Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
 4. Program Perum Daerahusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
 5. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
 6. Program Aplikasi Informatika;
 7. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 8. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
 9. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 10. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
 12. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
 13. Program Perekonomian Dan Pembangunan;
 14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- **Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Kepegawaian Daerah;
 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, yang dilaksanakan melalui program :**
 1. Program Pendaftaran Penduduk;

2. Program Pencatatan Sipil;
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
5. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD;
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
7. Program Pengelolaan Arsip;
8. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
9. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

2.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Bupati Lampung Tengah telah menetapkan dokumen penetapan kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target yang akan dicapai pada tahun 2021.

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target yang akan dicapai pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

MISI I : Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan produktif, meliputi :

1. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan dengan indikator sasaran :
 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) 90,27;
 - Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis) 17,86%.
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah, dengan indikator sasaran :
 - Rata-rata lama sekolah (MYS) 9,4 Tahun;
 - Lama harapan sekolah (EYS) 12,28 Tahun.
3. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan dengan indikator sasaran:
 - Usia harapan hidup 69,94 Tahun;
 - Prevalensi intervensi stunting 12,7 persen.
4. Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga dengan indikator sasaran:
 - Laju pertumbuhan penduduk 0,66 persen.

MISI II: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan, meliputi :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan, dengan indikator sasaran :
 - Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten 63,5 persen;
 - Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten 88,36 persen.
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten, dengan indikator sasaran:
 - Rasio konektivitas Kabupaten/Kota 83 persen
 - Kinerja lalu Lintas Kabupaten/Kota 0,58 v/c.
3. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi, dengan indikator sasaran :
 - Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2 sebesar 94,26 persen
4. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat, dengan indikator sasaran :
 - Jumlah luas kawasan kumuh 52,33 ha
 - Rumah tidak layak huni 23,74 persen
 - Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman 89,6 persen
 - Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman 94,44 persen
5. Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator sasaran :
 - Indeks kualitas lingkungan air 58,34 IKA
 - Indeks kualitas udara 83,98 IKU
 - Indeks kualitas lahan 26,86 ITL

6. Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan, dengan indikator sasaran :
 - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tata Ruang 78 persen

MISI III: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penanggulangan kemiskinan yang terpadu, meliputi:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan, dengan indikator sasaran :
 - Score PPH 86,1 Nilai
 - Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB 36,4 persen
 - Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 10 persen
 - Kontribusi sektor industri pengolahan Non Migas dalam PDRB 22,9 persen
2. Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat, dengan indikator sasaran
 - Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi 20 persen

3. Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator sasaran :
 - Rasio Kemandirian Fiskal 7,29 persen
4. Meningkatnya Iklim Investasi Daerah, dengan indikator sasaran :
 - Persentase peningkatan investasi 10 persen
5. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung, dengan indikator sasaran :
 - Indeks Desa Membangun 0,714 indeks
6. Menurunnya angka pengangguran, dengan indikator sasaran:
 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 73,48 persen
7. Meningkatnya penanganan kemiskinan, dengan indikator sasaran :
 - Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil satu 4 persen

MISI IV: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat, meliputi :

1. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial, dengan indikator sasaran :
 - Jumlah kejadian Konflik Sosial 0 kejadian

2. Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, dengan indikator sasaran :
 - Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda 10 persen
3. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, dengan indikator sasaran :
 - Indeks Resiko Bencana 72,16 indeks/kategori sedang

MISI V: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik yang berkualitas, meliputi :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sasaran:
 - Opini BPK atas laporan keuangan WTP predikat
 - Indeks SPBE 2 indeks
 - Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah B Nilai
 - Indek Inovasi Daerah 1,725 indeks/predikat inovatif
2. Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel, dengan indikator sasaran:
 - Indeks Profesionalitas ASN 56 indeks
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator sasaran:

- Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
85,01 persen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah partisipatif yang diambil. Termasuk pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugastugas lainnya.

3.1. CAPAIAN KINERJA

3.1.1 Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Misi I

Pada Misi I terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi I Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,27	90,27	100
		Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	Persen	17,86	0	0

2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah	Rata-rata lama sekolah (MYS)	Tahun	9,4	7,59	80,74
		Lama harapan sekolah (EYS)	Tahun	12,28	12,93	105,29
3	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan	Usia harapan hidup	Tahun	69,94	69,87	99,90
		Prevalensi intervensi stunting	Persen	12,7	6,3	150,39
4	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,66	1,59	240,91

Sasaran 1 : Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan.

Sasaran ini dikembangkan melalui 8 (delapan) program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indek Pembangunan Gender pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 90,27 persen dengan realisasi sebesar 90,27 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen.

- **Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)**

Presentase cabang olahraga yang berprestasi pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 17,86 persen dengan realisasi sebesar 0 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 0 persen. Hal ini dikarenakan situasi pandemic *Covid-19* banyak penyelenggaran dan *event* olahraga tidak

dilaksanakan, sehingga Kabupaten Lampung Tengah tidak mengirimkan utusan dan perwakilan untuk tingkat Nasional maupun Internasional.

Sasaran 2: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah

Sasaran ini dikembangkan melalui 6 (enam) program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Rata-rata lama sekolah (MYS)**

Rata-rata lama sekolah pada Tahun 2021 ditargetkan 9,4 dengan realisasi sebesar 7.59 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 80.74 persen.

- **Lama harapan sekolah (EYS)**

Lama harapan sekolah pada Tahun 2021 ditargetkan 12,28 persen dengan realisasi sebesar 12,93 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,29 persen.

Sasaran 3: Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan

Sasaran ini dikembangkan melalui 4 (empat) program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Usia harapan hidup**

Usia Harapan hidup pada Tahun 2021 ditargetkan 69,94 tahun. Realisasi sebesar 69,87 tahun atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,90 persen.

- **Prevalensi Intervensi Stunting**

Prevalensi stunting pada tahun 2021 ditargetkan menurun menjadi sebesar 12,7 persen dengan realisasi 6,3 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 150,39 persen.

Sasaran 4: Meningkatkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga

Sasaran ini dikembangkan melalui 3 (tiga) program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Laju pertumbuhan penduduk**

laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 0,66 persen dengan realisasi sebesar 1,59 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 240,91 persen.

2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Misi II

Pada Misi II terdapat 6 (enam) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi II Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	63,5	61,50	96,85
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten	Persen	88,36	88,36	100
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota	Persen	83	58	69,88
		Kinerja lalu Lintas Kabupaten/ Kota	v/c	0,58	0,57	98,28
3	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase luas areal sawah daerah irigasi dengan IP>2	Persen	94,26	72,60	77,02
4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Jumlah luas kawasan kumuh	ha	52,33	7,79	185,11
		Rumah tidak layak huni	Persen	23,74	5,51	176,79
		Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	Persen	89,6	89,88	100,31
		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	Persen	94,44	94,89	100,48

5	Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan air	IKA	58,34	56,67	97,14
		Indeks kualitas udara	IKU	83,98	83,46	99,38
		Indeks kualitas lahan	ITL	26,86	24,48	91,14
6	Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persen	78	73,4	94,10

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan

Sasaran ini dikembangkan melalui 2 (dua) program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten**

Prosentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 63,5 persen dengan realisasi sebesar 61,50 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96,85 persen.

- **Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten**

Prosentase Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 88,36 persen dengan realisasi sebesar 88,36 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.

Sasaran 2: *Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten*

Sasaran ini dikembangkan melalui 2 (dua) program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Rasio konektivitas Kabupaten/Kota**

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 83 persen dengan realisasi sebesar 58 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 69,88 persen.

- **Kinerja lalu Lintas Kabupaten/Kota**

Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 0,58 dengan realisasi sebesar 0,57 atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,28 persen.

Sasaran 3: *Meningkatnya kualitas jaringan irigasi*

Sasaran ini dikembangkan melalui 1 (satu) program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2**

Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2 pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 94,26 persen dengan realisasi sebesar 72,60 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 77,02 persen.

Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat

Sasaran ini dikembangkan melalui 7 (tujuh) program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Jumlah luas kawasan kumuh**

Jumlah prosentase luas kawasan kumuh pada tahun 2021 ditargetkan menurun menjadi sebesar 52,33 persen dengan realisasi sebesar 7,79 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 185,11 persen.

- **Rumah tidak layak huni**

Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2021 ditargetkan menurun menjadi sebesar 23,74 persen dengan realisasi sebesar 5,51 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 176,79 persen.

- **Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman**

Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman pada tahun 2021 ditargetkan meningkat menjadi sebesar 89,6 persen dengan realisasi sebesar 89,88 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,31 persen.

- **Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman**

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman pada tahun 2021 ditargetkan meningkat menjadi 89.6 persen dengan realisasi sebesar

89,88 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,31 persen.

Sasaran 5 : Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Sasaran ini dikembangkan melalui 9 (sembilan) program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Indeks kualitas lingkungan air**

Indeks kualitas air di Tahun 2021 ditargetkan 58,34 IKA dengan realisasi sebesar 56,67 IKA atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 97,14 persen.

- **Indeks kualitas udara**

Indeks kualitas udara di Tahun 2021 ditargetkan 83,98 IKU dengan realisasi sebesar 83,46 IKU atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 99,38 persen.

- **Indeks kualitas lahan**

Indeks tutupan lahan di Tahun 2021 ditargetkan 26,86 TL dengan realisasi sebesar 24,48 TL atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 91,14 persen.

Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan

Sasaran ini dikembangkan melalui 3 (tiga) program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tata Ruang**

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang pada tahun 2021 ditargetkan meningkat

menjadi 78 persen dengan realisasi sebesar 73,4 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 94,10 persen.

3. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Misi III

Pada Misi III terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi III Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Score PPH	Nilai	86,1	87,5*	101,62
		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB	Persen	36,4	0,8*	2,19
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	10	3,68*	36,8
		Kontribusi sektor industri pengolahan Non Migas dalam PDRB	Persen	22,9	2,88*	12,57
2	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	Persen	20	46	230
3	Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Persen	7,29	9,47	129,90

4	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase peningkatan investasi	Persen	10	9	90
5	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,714	0,707	99,02
6	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,48	50	68,04
7	Meningkatnya penanganan kemiskinan	Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	Persen	4	5,4	135

Ket: * data sementara

Sasaran 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan

Sasaran ini dikembangkan melalui 22 program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Score PPH (Pola Pangan Harapan)**

Score PPH (Pola Pangan Harapan) pada tahun 2021, ditargetkan 86,1 persen dengan realisasi sebesar 87,5 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101,62 persen.

- **Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB**

Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan, perikanan pada tahun 2021 ditargetkan mencapai 36.4 persen dengan realisasi sebesar 0,8 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 2,19 persen.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan pada tahun 2021 ditargetkan mencapai 10 persen dengan realisasi sebesar 3,68 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 36,8 persen.

- **Kontribusi sektor industri pengolahan Non Migas dalam PDRB**

Pertumbuhan ekonomi sektor industri non migas pada tahun 2021 ditargetkan mencapai 22,9 persen dengan realisasi sebesar 2,88 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 12,57 persen.

Sasaran 2 : Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat

Sasaran ini dikembangkan melalui 7 (tujuh) program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Persentase peningkatan volume usaha Koperasi**

Persentase peningkatan volume usaha koperasi pada tahun 2021 ditargetkan mencapai 20 persen dengan realisasi sebesar 46 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 230 persen.

Sasaran 3: Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Sasaran ini dikembangkan melalui 5 (lima) program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Rasio Kemandirian Fiskal**

Rasio Kemandirian Fiskal pada tahun 2021 ditargetkan 7,29 persen dengan realisasi sebesar 9,47 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 129,90 persen.

Sasaran 4 : Meningkatnya Iklim Investasi Daerah

Sasaran ini dikembangkan melalui 5 program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Persentase peningkatan investasi**

Persentase peningkatan nilai investasi pada tahun 2021 ditargetkan 10 persen dengan realisasi sebesar 9 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 90 persen.

Sasaran 5 : Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung

Sasaran ini dikembangkan melalui 4 (empat) program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Indeks Desa Membangun**

Indeks desa membangun pada tahun 2021 ditargetkan 0,714 dengan realisasi sebesar 0,707 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,02 persen.

Sasaran 6 : Menurunnya angka pengangguran

Sasaran ini dikembangkan melalui 3 (tiga) program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2021 ditargetkan 73,48 persen dengan realisasi sebesar 50 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 68.04 persen.

Sasaran 6 : Meningkatnya penanganan kemiskinan

Sasaran ini dikembangkan melalui 4 (empat) program, dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1**

Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1 pada tahun 2021 ditargetkan 4 persen dengan realisasi sebesar 5,4 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 135 persen.

4. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Misi IV

Pada Misi IV terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi IV Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Jumlah kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0	100%
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	persen	10	12	120%
3	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Kategori	Sedang	Sedang	100%

Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial

Sasaran ini dikembangkan melalui 5 (lima) program dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Jumlah kejadian Konflik Sosial**

Pada tahun 2021 jumlah kejadian konflik sosial ditargetkan sebesar 0 kasus dengan realisasi sebanyak 0 kasus dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.

Sasaran 2: Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Sasaran ini dikembangkan melalui 3 (tiga) program dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda**

Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda Tahun 2021 ditargetkan 10 persen, realisasi sebesar 12 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 120 persen.

Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana

Sasaran ini dikembangkan melalui 2 (dua) program dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Indeks Resiko Bencana**

Indeks resiko bencana di Tahun 2021 ditargetkan 72,16 persen dengan realisasi sebesar 38,50 persen atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 146,65 persen.

5. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Misi V

Pada Misi V terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi V Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	predikat	WTP	WTP*	100
		Indeks SPBE	indek	2	1,68	84
		Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	predikat	B	B*	100
		Indek Inovasi Daerah	Predikat	inovatif	inofatif	100
2	Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	indek	56	46,11*	82,34
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Persen	85,01	85,15	100,16

Catatan: * Data Sementara

Sasaran 1: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

Sasaran ini dikembangkan melalui 14 (empat belas) program dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Opini BPK atas laporan keuangan**

Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2021 ditargetkan mendapatkan WTP dengan realisasi WTP atau dengan nilai capaian kinerja 100 persen.

- **Indeks SPBE**

Indeks SPBE di Tahun 2021 ditargetkan 2 dengan realisasi sebesar 1,68 atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 84 persen.

- **Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah**

Nilai akuntabilitas kinerja adalah nilai hasil evaluasi atas laporan kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Tahun 2021 ditargetkan nilai B dengan realisasi nilai B atau dengan nilai capaian kinerja 100 persen.

- **Indek Inovasi Daerah**

Indeks inovasi daerah di Tahun 2021 ditargetkan mendapatkan predikat inovatif, dengan realisasi inovatif atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 persen.

Sasaran 2: Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel

Sasaran ini dikembangkan melalui 2 (dua) program dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Indeks Profesionalitas ASN**

Indeks profesionalitas ASN di Tahun 2021 ditargetkan 56 dengan realisasi sebesar 46,11 atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 82,34 persen.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran ini dikembangkan melalui 7 (tujuh) program dengan rincian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dilihat dari capaian kinerja indikator:

- **Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik**

Indek kepuasan masyarakat pada tahun 2021 ditargetkan mendapatkan nilai 85,01 dengan realisasi nilai 85,15 atau dengan nilai capaian kinerja 100,16 persen.

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Untuk melihat perkembangan capaian sasaran tahun 2021 terhadap capaian sasaran tahun 2020 dan 2019, maka dilakukan perbandingan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2020 dan 2019. Berikut disajikan dalam tabel rekapitulasi perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan 2019.

Tabel 3.6

Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi I

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100%	99,91%	100%
		Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	37,33%	0%	0%
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian	Rata-rata lama sekolah (MYS)	100,37%	100%	80,74%
		Lama harapan sekolah (EYS)	100%	100%	105,29%

	budaya daerah				
3	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan	Usia harapan hidup	100%	100,49%	99,90%
		Prevalensi intervensi stunting	92,33%	129,54%	150,39%
4	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk	98,76%	93,59%	240,91%
Rata-Rata Capaian Kinerja			89,83%	89,08%	111,03%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Misi I dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi kenaikan setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa capaian kinerja pada Misi I dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.7

Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	114,68%	98,09%	96,85%
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten	N/A	100%	100%
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	N/A	57%	69,88%
		Kinerja lalu Lintas Kabupaten/Kota	N/A	82%	98,28%
3	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase luas areal sawah daerah irigasi dengan IP>2	N/A	N/A	77,02%

4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Jumlah luas kawasan kumuh	180,75	186	185,11%
		Rumah tidak layak huni	105,53%	107,83%	176,79%
		Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	103,67%	101,70%	100,31%
		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	117,87%	112,26%	100,48%
5	Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan air	137,46%	133,78%	97,14%
		Indeks kualitas udara	115,13%	108,84%	99,38%
		Indeks kualitas lahan	100,43%	86,57%	91,14%
6	Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	95,32%	73,4%	94,10%
Rata-Rata Capaian Kinerja			118,98%	103,96%	106,65%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Misi II dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi kenaikan setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa capaian kinerja pada Misi II dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.8

Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021

1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Score PPH	99,18%	103,51%	101,62%
		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB	2,91	2,19	2,19
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	69,7	0	36,8
		Kontribusi sektor industri pengolahan Non Migas dalam PDRB	23,36	0	12,57
2	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	88,75%	360,8%	230%
3	Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	N/A	101,37%	129,90%
4	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase peningkatan investasi	90%	90%	90%
5	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indeks Desa Membangun	94,16%	97,09%	99,02%
6	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,06	70,16	68,04
7	Meningkatnya penanganan kemiskinan	Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	160%	57,5%	135%
Rata-Rata Capaian Kinerja			77,46%	88,26%	90,51%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Misi III dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi kenaikan setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa capaian kinerja pada Misi III kategori baik.

Tabel 3.9

Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Jumlah kejadian Konflik Sosial	100%	100%	100%
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	100%	100%	120%
3	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja			100%	100%	106,67%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Misi IV dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi kenaikan setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa capaian kinerja pada Misi IV dalam kategori sangat baik.

Tabel 3.10

Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Misi V

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021

1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	100%	100%	100%
		Indeks SPBE	N/A	60%	84%
		Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	100%	100%	100%
		Indek Inovasi Daerah	N/A	100%	100%
2	Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	82,34%	82,34%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	106,27%	106,14%	100,16%
Rata-Rata Capaian Kinerja			102,09	91,41	94,42

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Misi V dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi kenaikan setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa capaian kinerja pada Misi V dalam kategori sangat baik.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Penjabaran perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah diakhir tahun RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RPJMD	REALISASI PK	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

MISI I						
Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat						
1	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,27	90,27	100
		Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	Persen	17,86	0	0
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah	Rata-rata lama sekolah (MYS)	Tahun	9,4	7,59	80,74
		Lama harapan sekolah (EYS)	Tahun	12,28	12,93	105,29
3	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan	Usia harapan hidup	Tahun	69,94	69,87	99,90
		Prevalensi intervensi stunting	Persen	12,7	6,3	150,39
4	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,66	1,59	240,91
MISI II						
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa						
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	63,5	61,50	96,85
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten	Persen	88,36	88,36	100
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota	Persen	83	58	69,88
		Kinerja lalu Lintas Kabupaten/ Kota	v/c	0,58	0,57	98,28

3	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase luas areal sawah irigasi dengan IP>2	Persen	94,26	72,60	77,02
4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Jumlah luas kawasan kumuh	ha	52,33	7,79	185,11
		Rumah tidak layak huni	Persen	23,74	5,51	176,79
		Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	Persen	89,6	89,88	100,31
		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	Persen	94,44	94,89	100,48
5	Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan air	IKA	58,34	56,67	97,14
		Indeks kualitas udara	IKU	83,98	83,46	99,38
		Indeks kualitas lahan	ITL	26,86	24,48	91,14
6	Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persen	78	73,4	94,10
MISI III Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan						
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Score PPH	Nilai	86,1	87,5*	101,62
		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB	Persen	36,4	0,8	2,19
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	10	3,68	36,8

		Kontribusi sektor industri pengolahan Non Migas dalam PDRB	Persen	22,9	2,88	12,57
2	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	Persen	20	46	230
3	Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Persen	7,29	9,47	129,90
4	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase peningkatan investasi	Persen	10	9	90
5	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,714	0,707	99,02
6	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,48	50	68,04
7	Meningkatnya penanganan kemiskinan	Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	Persen	4	5,4	135
MISI IV						
Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah						
1	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Jumlah kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0	100%
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	persen	10	12	120%

3	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	kategori	sedang	sedang	100
MISI V Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	100
		Indeks SPBE	indek	2	1,68	84
		Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	predikat	B	B	100
		Indek Inovasi Daerah	Predikat	inovatif	inofatif	100
2	Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	indek	56	46,11	82,34
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Persen	85,01	85,15	100,16

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional

Untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan realisasi kinerja di Kabupaten Lampung Tengah, maka diperlukan adanya perbandingan dengan standar nasional, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI PK	STANDAR NASIONAL	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI I Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat						

1	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,27	(Min : 0) (Max : 100)	BPS
		Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	Persen	0	Tidak ada	
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah	Rata-rata lama sekolah (MYS)	Tahun	7,59	(Min : 0 Thn) (Max : 15Thn)	BPS
		Lama harapan sekolah (EYS)	Tahun	12,93	(Min : 0 Thn) (Max : 18Thn)	BPS
3	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan	Usia harapan hidup	Tahun	69,87	(Min :20 Thn) (Max :85Thn)	BPS
		Prevalensi intervensi stunting	Persen	6,3	14%	Kemenkes
4	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,59	0,98	BPS
MISI II						
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa						
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	61,50	Tidak ada	
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten	Persen	88,36	Tidak ada	
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota	Persen	58	Tidak ada	
		Kinerja lalu Lintas Kabupaten/ Kota	v/c	0,57	Tidak ada	
3	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2	Persen	72,60	Tidak ada	
4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Jumlah luas kawasan kumuh	ha	7,79	Tidak ada	
		Rumah tidak layak huni	Persen	5,51	Tidak ada	
		Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	Persen	89,88	Tidak ada	
		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	Persen	94,89	Tidak ada	
5	Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan air	IKA	56,67	55,20	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Indeks kualitas udara	IKU	83,46	87,3	
		Indeks kualitas lahan	ITL	24,48	73,4	
6	Meningkatnya kualitas penataan ruang yang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persen	73,4	Tidak ada	

	berwawasan lingkungan					
MISI III						
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan						
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Score PPH	Nilai	87,5	91,6	RPJMN 2020-2024 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB	Persen	0,8	Tidak ada	
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	3,68	Tidak ada	
		Kontribusi sektor industri pengolahan Non Migas dalam PDRB	Persen	2,88	Tidak ada	
2	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	Persen	46	Tidak ada	
3	Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Persen	9,47	Tidak ada	
4	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase peningkatan investasi	Persen	9	Tidak ada	
5	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,707	Desa sMandiri: > 0,8155 Desa Maju: ≤0,8155 dan >0,7072 Desa Tertinggal: ≤0,5989 dan >0,4907 Desa Sangat Tertinggal: ≤0,4907	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	50	Tidak ada	
7	Meningkatnya penanganan kemiskinan	Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	Persen	5,4	Tidak ada	
MISI IV						
Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah						
1	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Jumlah kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	Tidak ada	

2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	persen	12	Tidak ada	
3	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	kategori	sedang	Tidak ada	
MISI V						
Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	predikat	WTP	1. WTP 2. WDP 3. Opini Tidak Wajar 4. TMP	UU No.5 Th.2004
		Indeks SPBE	indek	1,68	1. 4,2 - 5,0 2. 3,5 - <4,2 3. 2,6 - <3,5 4. 1,8 - <2,6 5. <1,8	PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2018
		Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	predikat	B	1. >0-30 sangat kurang 2. >30-50 kurang 3. >50-60 cukup 4. >60-70 baik 5. >70-80 sangat baik 6. >80-90 Memuaskan 7. >90-100 sangat memuaskan	PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021
		Indek Inovasi Daerah	Predikat	inofatif	1. Sangat Inovatif 2. Inovatif 3. Kurang Inovatif 4. Tidak Dapat Dinilai	Kepmendagri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021
2	Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	indek	46,11	1. 91-100 2. 81-90 3. 71-80 4. 61-70 5. 60 kebawah	Peraturan BKN RI Nomor 8 Tahun 2019
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Persen	85,15	1. 25-43,75 D 2. 43-76-62,50 C 3. 62,51-81,25 B 4. 81,26-100 A	PermenPANRB no 14 Tahun 2017

1. Pada Misi 1 dari 7 indikator, terdapat 6 indikator yang mempunyai standar nasional, yaitu:
 - Indeks pembangunan gender di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 90,27 mendekati nilai maksimal yang ditetapkan oleh BPS sebesar 100, hal ini menunjukkan semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki.
 - Rata-rata lama sekolah (MYS) sebesar 7,59 tahun berada di tengah nilai maksimal yang ditetapkan oleh BPS sebesar 15 tahun, hal ini menunjukkan secara rata-rata penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 7,59 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.
 - Lama harapan sekolah (EYS) sebesar 12,93 tahun berada di bawah nilai maksimal yang ditetapkan oleh BPS sebesar 18 tahun, hal ini menunjukkan secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,93 tahun atau setara dengan Diploma I.
 - Usia Harapan Hidup di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 69,87 tahun, masih dibawah nilai maksimal yang ditetapkan oleh BPS sebesar 85 tahun, tetapi nilai UHH pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,03 tahun dari tahun 2020 sebesar 69,84 tahun.
 - Prevelensi intervensi stunting di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 6,3% berada di atas dari standar nasional sebesar 14%, hal ini tidak lepas dari keberhasilan program-program penanggulangan stunting yang telah dilakukan diantaranya adalah; Pemberian Makanan

Tambahan (PMT) pada Balita dan Ibu Hamil, Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri dan ibu hamil, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita, pemberian vitamin A.

- Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 sebesar 1,59 berada diatas dari standar nasional 0,98 . Hal ini dapat disebabkan oleh dua hal pertama karena tingginya angka kelahiran dan kedua karena tingginya angka migrasi bersih (migrasi masuk dikurangi migrasi keluar)
2. Pada Misi 2 dari 13 indikator, terdapat 3 indikator yang mempunyai standar nasional, yaitu Indeks kualitas lingkungan air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks kualitas lahan (ITL). Untuk IKA realiasi melebihi dari target nasional hal ini menjelaskan bahwa maknanya bahwa hak masyarakat untuk melihat lingkungan yang baik dan bersih bisa kita penuhi, terjadi perbaikan dalam sistem pembuangan seperti mandi dan cuci dari kegiatan rumah tangga, dan berkurangnya pencemaran air, Selain itu keberhasilan pencapaian indikator ini juga dapat dilihat dari Persentase penanganan sampah, Persentase penduduk berakses air minum, Persentase luas pemukiman yang tertata, Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air, Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, Penegakan hukum lingkungan, Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih, Jumlah hari dengan Kualitas Udara Kategori Baik. Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah.

Pada tahun 2021 prosentase penanganan sampah mencapai 31,13 persen, kondisi ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 yang sebesar 24,91 persen. Hal ini disebabkan Penambahan armada pengangkutan sampah untuk meningkatkan volume sampah perkotaan yang dapat diangkut dan ditangani ke tempat pembuangan akhir. Pada tahun 2021 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal mencapai 100 persen, kondisi ini sama dibanding tahun 2020 yang sebesar 100 persen. Pada tahun 2021 luas Tempat pembuangan sampah (TPS) mencapai 2,44 ha, kondisi ini meningkat dengan tahun 2020 yang sebesar 2 ha. Hal ini disebabkan ada penambahan lahan untuk TPS/TPA yang sebelumnya tidak pernah dipakai.

IKU walaupun dibawah target nasional, namun realisasi nya sudah mendekati dari target nasional. Berdasarkan hasil sampling analisis kandungan NO₂, SO₂, NH₃, H₂S dan Kebisingan pada Kota Gunung Sugih pada tahun 2020 dan 2021 di atas, maka menunjukkan bahwa kualitas kondisi udara di Kota Gunung Sugih mengalami sedikit penurunan namun masih dibawah ambang batas toleransi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) parameter yaitu NO_x dan SO_x , diantaranya :

- **Parameter NO_x**

Tahun 2021 di Kota Gunung Sugih kecenderungan kadar NO_x meningkat dari tahun 2020. Hal ini seiring dengan normalnya aktifitas kendaraan bermotor dan industri di masa pandemi covid 19 di tahun 2021.

- **Parameter SO_x** Di Kota Gunung Sugih Tahun 2021 kecenderungan SO_x naik dari 2020. Kenaikan parameter ini dominannya berasal dari normalnya aktifitas kendaraan bermotor dan aktifitas industri di masa pandemi covid 19 di tahun 2021. Masih adanya kegiatan pembakaran sampah yang dilakukan sebagian masyarakat di pemukiman dapat menyebabkan kenaikan kadar SO_x walaupun tidak signifikan.

Namun demikian melihat dari lokasi Kota Gunung Sugih sebagai Kabupaten Lampung Tengah yang berada di Jalur Lintas Sumatera, maka kualitas udara ambien juga sangat dipengaruhi oleh emisi dari kendaraan bermotor yang termasuk sumber emisi bergerak.

ITL masih dibawah standar nasional, hal ini disebabkan belum adanya kenaikan yang signifikan terhadap peningkatan luas tutupan hutan dan penambahan RTH dan RHL.

3. Pada misi 3 dari 10 indikator terdapat 2 indikator yang mempunyai standar nasional yaitu score PPH dan indeks desa membangun.

- Score PPH dengan realiasi di tahun 2021 sebesar 86,1 jika dibandingkan dengan target RPJMN 2020-2024 Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian sebesar 91,6 maka masih berada dibawah target RPJMN. Scor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan, semakin tinggi score PPH maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan

penduduk. Untuk mencapai skor ideal (PPH 100) yang diharapkan dapat dicapai paling lambat pada tahun 2020 maka diperlukan strategi yang dapat digunakan untuk mencapai hal tersebut, yaitu :

- a) Peningkatan produksi hasil pangan hewani.
 - b) Penganekaragaman pola asupan pangan dari hewani.
 - c) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya beli masyarakat.
 - d) Program intensifikasi dan usaha-usaha peternakan masyarakat untuk ternak kecil dan besar kepada petani kecil.
- Indeks Desa Membangun Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 mencapai 0,707 masuk dalam kategori status Maju. Hal ini sesuai dengan kategori status yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu:
- a) Desa Mandiri: $> 0,8155$
 - b) Desa Maju: $\leq 0,8155$ dan $> 0,7072$
 - c) Desa Tertinggal: $\leq 0,5989$ dan $> 0,4907$
 - d) Desa Sangat Tertinggal: $\leq 0,4907$

Berikut ini rincian dari status desa di Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2020 dan 2021.

NO	STATUS DESA	TAHUN		PROGRES
		2020	2021	
1	MANDIRI	0	3	Bertambah 3 Desa
2	MAJU	83	121	Bertambah 38 Desa
3	BERKEMBANG	207	174	Berkurang 33 Desa

4	TERTINGGAL	11	3	Berkurang 8 Desa
5	SANGAT TERTINGGAL	0	0	Tetap
JUMLAH		301	301	

4. Pada Misi 4 indikator jumlah kejadian Konflik Sosial dan Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda, belum ada untuk standar nasionalnya, tapi jika dilihat dari capaian kinerja dari indikator tersebut, dapat disimpulkan telah terbentuk kondisi kerukunan di masyarakat, tidak ada konflik serta ketaatan pada aturan daerah. Untuk indikator indeks Resiko Bencana, dari BNPB tidak mengeluarkan standar nasional untuk indeks resiko bencana (IRB), BNPB membagi 3 (tiga) kategori IRB yaitu IRB kategori tinggi, IRB kategori sedang dan IRB kategori rendah, Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam kategori sedang, IRB ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran capaian program penanggulangan bencana yang sudah dilakukan di Kabupaten.

5. Pada misi 5, semua indikator mempunyai standar nasionalnya.

- Opini BPK atas laporan keuangan pada tahun 2021 mendapatkan predikat WTP, hal ini merupakan predikat tertinggi sesuai dengan standar nasional, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas

entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- Indeks SPBE Kabupaten Lampung Tengah masih pada indeks 1,68 termasuk dalam predikat kurang, hal ini masih jauh dibawah target nasional. Menurut PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Predikat Indeks SPBE dibagi menjadi 5, yaitu:

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Hal ini menunjukkan perlu melakukan perbaikan penerapan SPBE dan peningkatan kualitas layanan SPBE di Kabupaten Lampung Tengah.

- Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan predikat baik dengan nilai 63,52. Hal ini menunjukkan terdapat gambaran bahwa AKIP di Kabupaten Lampung Tengah sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja, pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
- Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan predikat inovatif, hal ini sesuai dengan

Kepmendagri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021 terdapat 4 kategori untuk indeks inovasi daerah, yaitu sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai.

- Indeks Profesional ASN, di tahun 2021 sebesar 46,11, masih dalam kategori sangat rendah, hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN terdapat 5 kategori tingkat profesional ASN, yaitu 91-100 sangat tinggi, 81-90 tinggi, 71-80 sedang, 61-70 rendah, 60 kebawah masuk dalam kategori sangat rendah. Dengan Indeks Profesional ASN yang sangat rendah dipengaruhi beberapa hal diantaranya kompetensi yang masih kurang, budaya kerja yang masih lemah dalam pengawasan, hingga kebijakan sanksi yang diberikan belum memberi efek jera, Hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk lebih serius menata ASN, dengan menggunakan sistem merit, serta mulai membenahi dari mulai proses penerimaan PNS sampai dengan pelatihan, guna meningkatkan kompetensi ASN.
- Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 sebesar 85,15 dengan kategori sangat baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik terdapat 4 mutu pelayanan, yaitu 25-43,75 D (tidak baik), 43,76-62,50 C (kurang baik), 62,51-81,25 B (Baik), 81,26-100 A (sangat baik).

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan

1. Pada Misi I rata-rata capaian sebesar 111,03% terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja, jika dilihat dari rata-rata capaian maka capaian kinerja pada misi I dalam kategori sangat baik. Keberhasilan ini dikarenakan:
 - a. Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan, dan mengoptimalkan pemanfaatan TI untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
 - b. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.
 - c. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pengembangan seni dan budaya
 - d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat

- e. Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk melalui intensifikasi program Keluarga Berencana dan ketahanan keluarga
 - f. Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak melalui pengarusutamaan hak anak dan perlindungan khusus Anak
 - g. Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor, wirausaha muda, dan Pramuka
 - h. Membudayakan berolahraga agar dapat hidup sehat dan meningkatkan prestasi olahraga melalui pembibitan atlet peningkatan kompetensi atlet berbakat, pelatih dan wasit melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga
2. Pada Misi II rata-rata capaian sebesar 106,65% terdiri dari 6 (enam) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja, jika dilihat dari rata-rata capaian maka capaian kinerja pada misi II dalam kategori sangat baik. Keberhasilan ini dikarenakan:
- a. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, melalui pembangunan dan rehabilitasi
 - b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih

- c. Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan
 - d. Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi kewenangan Kabupaten
 - e. Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur, pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh, dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru
 - f. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; rehabilitasi rumah akibat korban bencana dan rumah yang terkena dampak program pemerintah
 - g. Meningkatkan pengelolaan SDA lingkungan hidup sesuai daya dukung daya tampung
 - h. Meningkatkan pengelolaan sampah dengan memperluas area pelayanan sampah, pengolahan sampah di TPA, dan pengurangan sampah (3R)
 - i. Meningkatkan koordinasi penataan ruang daerah
3. Pada Misi III rata-rata capaian sebesar 90,51%, 7 (tujuh) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, jika dilihat dari rata-rata capaian maka capaian kinerja pada misi III dalam kategori baik. Keberhasilan ini dikarenakan:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, modernisasi pertanian, penguatan kapasitas sumber daya pertanian, serta penanganan bencana pertanian
- b. Meningkatkan pengembangan ternak melalui penyediaan sarana dan prasarana peternakan, dan pemanfaatan teknologi peternakan, serta peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
- c. Meningkatkan produktivitas perikanan melalui penerapan cara budidaya ikan yang baik, pendampingan pemasaran, industri pengolahan perikanan, dan penyediaan sarana produksi perikanan
- d. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau
- e. Meningkatkan sarana distribusi perdagangan, mempermudah perijinan serta pendaftaran perusahaan perdagangan, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah
- f. Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap tenaga kerja local
- g. Meningkatkan kunjungan wisata dan Mengembangkan daerah tujuan wisata unggulan dan

destinasi wisata baru, agrowisata dan ekowisata, serta infrastruktur pengembangan pariwisata

- h. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
- i. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam upaya peningkatan PAD melalui pembinaan existing BUMD dan atau pendirian BUMD baru
- j. Mendorong perkembangan IKM, UMKM, dan koperasi
- k. Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi, pemasaran investasi dan kemudahan perizinan berusaha di daerah
- l. Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMKam, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat Kampung, pengembangan Posyantek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah Kampung
- m. Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja yang telah dibekali ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
- n. Meningkatkan upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan/hubungan industrial
- o. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial

4. Misi IV rata-rata capaian sebesar 106,67% terdiri dari (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja, jika dilihat dari rata-rata capaian maka capaian kinerja pada misi IV dalam kategori sangat baik. Keberhasilan ini dikarenakan:
 - a. Peningkatan kondusivitas daerah, pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk mengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat.
 - b. Meningkatkan pengendalian atas gangguan keamanan dan Ketertiban umum melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada, dan pembinaan PPNS
 - c. Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana

5. Misi V rata-rata capaian sebesar 94,42% terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja, jika dilihat dari rata-rata capaian maka capaian kinerja pada misi V dalam kategori sangat baik. Keberhasilan ini dikarenakan:
 - a. Meningkatkan pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas SDM perencana, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, perbaikan mekanisme perencanaan serta optimalisasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
- c. Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan penelitian dan pengembangan dan penyelenggaraan kompetisi Iptek
- d. Meningkatkan kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum melalui koordinasi, pemantauan, evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan kepala daerah
- e. Pengembangan e-goverment untuk menunjang sistem pemerintahan yang terbuka (open goverment) dan pelayanan publik secara online yang andal, terpercaya serta terjangkau
- f. Meningkatkan keamanan informasi melalui pengembangan teknologi dan peningkatan kompetensi SDM persandian
- g. Peningkatan implementasi *single data* didukung teknologi informasi terintegrasi
- h. Meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
- i. Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan

kesadaran masyarakat dan perbaikan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

- j. Meningkatkan pengelolaan kearsipan melalui dan pengembangan sarana dan prasarana kearsipan
- k. Peningkatan kualitas pelayanan transmigran
- l. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung/kelurahan
- m. Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD sesuai standar operasional prosedur

3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Kinerja Yang Telah Dicapai

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \frac{\{\text{Realisasi Biaya} \times 100\% \}}{\text{Target Biaya}}$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.807.530.364.867,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.992.734.655.679,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 0.187%.

Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya, namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas anggaran terhadap capaian misi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Per Sasaran Strategis Tahun 2021

MISI	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi I : Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	50	1.583.091.819	98,80
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah	93,01	155.905.399.655	94,81
	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan	125,15	113.043.302.014	79,49

	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	240,91	4.635.143.846	85,40
Misi II: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	98,43	256.833.722.075	61,15
	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	84,08	3.167.766.552,30	97,44
	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	77,02	32.163.306.242	85,06
	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	140,67	21.814.625.098,22	89,22
	Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	95,89	1.239.603.755	83,10
	Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	94,10	234.815.000	20,64
	Misi III: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	38,29	11.898.079.179

Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	230	903.071.888	99,73
	Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	129,90	2.868.039.515	95,40
	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	90	923.226.498	94,41
	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	99,02	1.296.762.930	83,62
	Menurunnya angka pengangguran	68,04	467.304.150	96,84
	Meningkatnya penanganan kemiskinan	135	1.362.151.059	73,52
	Misi IV: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	100	932.330.805
Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat		120	3.150.516.158	90,41
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana		146,65	9.850.618.422	87,32

Misi V: Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	96	156.174.305.104	91,89
	Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel	82,34	4.253.696.413	80,26
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100,16	22.829.213.689	73,79

Berdasarkan analisis dari tabel di atas ada indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran yang tinggi, namun pencapaian target untuk indikator sasaran dapat terealisasi sepenuhnya bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Hanya saja pada misi I dan misi III terdapat indikator yang capaian kinerjanya jauh dari target yang ditentukan, yaitu:

1. Misi I: Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan, hal ini disebabkan tahun 2021 pandemi covid-19 belum berakhir sehingga event Nasional untuk cabang olahraga tidak dilaksanakan sehingga untuk capaian kinerja pada indikator ini menjadi nol.
2. Misi III: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan faktor pandemi *covid-19* di tahun 2021 belum berakhir, tetapi walaupun capaiannya rendah, namun ini sudah menunjukkan pergerakan yang positif dalam pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan serta sektor industri pengolahan non migas. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 (lihat di bab 1 hal 20).

walaupun terdapat capaian kinerja yang rendah, namun hal ini tidak mempengaruhi hasil kinerja dari Kabupaten yang masih dalam kategori capaian indikator sangat tinggi dengan rata-rata capaian kinerja 101,86% dan jika dibandingkan dengan realisasi anggaran 81,34%, maka hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja Tahun 2021

MISI	JUMLAH INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi I : Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	4	111,03	78,18	32,85
Misi II: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa	6	106,65	79,91	30,88
Misi III: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan	7	90,51	89,76	0,75
Misi IV: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah	3	106,67	92,60	7,4

Misi V: Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan	3	94,42	87,70	6,72
--	---	-------	-------	------

3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan capaian kinerja dari semua sasaran strategis ini sebanyak 131 program dan 41 indikator.

1. Pada Misi I terdapat 22 program dan 9 indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 111,03%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada misi I dalam kategori sangat baik, dari 22 program tersebut semuanya berperan penting dalam mendukung pencapaian target kinerja dan ini menunjukkan bahwa Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat semakin meningkat.
2. Pada Misi II terdapat 25 program dan 13 indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 106,65%. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja beberapa program yang mendukung misi II, yaitu:
 - Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berhasil melaksanakan pembangunan jalan rigid/beton pada 5 ruas jalan di Kecamatan Sendang Agung dan Seputih Agung, yaitu Sendang Agung-Sri Way Langsep (3,7 Km), Sendang Agung-Sendang Asri (6,977 km) dan Sendang Agung-Payung Rejo (7,88 km), Bandar Jaya-Simpang Agung (4,177 km) dan Simpang Agung-

Selusuban (8,285 km), dan pekerjaan jalan lainnya sebagai berikut :

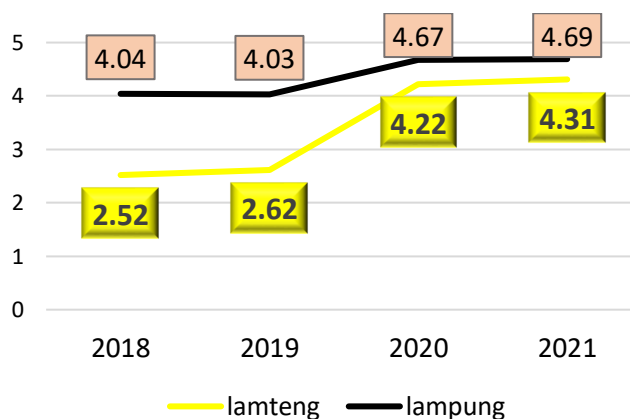
- a. Peningkatan jalan sepanjang 64 Km
- b. Pembangunan jembatan 20 unit
- c. Pemeliharaan Jalan sepanjang 27 km

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berencana akan menyelesaikan rigid ruas jalan Punggur-Gunung Sugih sepanjang 4,4 KM dan peningkatan/pemeliharaan jalan kabupaten sekitar 50 Km, dan berhasil mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendapatkan perbaikan jalan provinsi sepanjang ruas Kota Gajah-Simpang Randu, Simpang Randu-Sadewa, dan Bandar Jaya-Simpang Mandala.

- Pada Tahun 2021, dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan program/kegiatan, diantaranya:
 - a. Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK sebanyak 8 lokasi
 - b. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 15 lokasi
 - c. Pembangunan Sumur Pompa Mesin sebanyak 120 lokasi
 - d. Bedah Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 207 unit
- 3. Pada Misi III terdapat 50 program dan 10 indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 90,51%. Hal ini

dapat dilihat dari pencapaian kinerja beberapa program yang mendukung misi II, yaitu:

- Tren kemiskinan dari tahun 2017-2020 menunjukkan penurunan yang cukup baik. Namun seiring dengan Pandemi Covid 19 tren penurunan kemiskinan terputus dan mengalami peningkatan pada tahun 2021. Garis kemiskinan Tahun 2021 mengalami peningkatan dari Rp 436.777,- kapita/bulan pada tahun 2020 menjadi sebesar 450.232,-/per kapita per bulan.
- Dari tahun 2017-2021, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Tengah secara rata-rata setiap tahun selalu dibawah dari Tingkat Pengangguran Provinsi Lampung. Tren Angka Pengangguran meningkat dalam 2 tahun terakhir diakibatkan Pandemi Covid 19 yang menyebabkan berkurangnya kesempatan bekerja



- Indeks Desa Membangun adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu desa dalam melakukan pembangunannya. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah sebuah indeks komposit (kombinasi) yang dibentuk dari

indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. IDM Kabupaten Lampung Tengah berpredikat “MAJU” dengan raihan diatas 0,7074

Uraian	2018	2019	2020	2021
MANDIRI	0	0	0	3
MAJU	23	54	83	121
BERKEMBANG	177	221	207	174
TERTINGGAL	100	26	11	3
SANGAT TERTINGGAL	1	0	0	0

Sumber : Kemendes, PDT dan Transmigrasi

- Produktivitas pertanian padi Kabupaten Lampung Tengah mengalami selalu peningkatan.

Produksi padi pada tahun 2021 mencapai 652.787 Ton, surplus sebesar 53.676 Ton dari tahun 2020 Kabupaten Lampung Tengah menjadi penyumbang padi terbesar di Provinsi Lampung yaitu 22,61% dari total padi Lampung.

Produksi Jagung Kabupaten Lampung Tengah mengalami terus peningkatan, dan produksi tahun 2021 mencapai 482.411 Ton, meningkat 66.090 Ton. Sentra Utama Penghasil jagung berada di Kecamatan Rumbia, Terbanggi Besar, dan Bandar Mataram

Produksi Ubi Kayu Kabupaten Lampung Tengah mengalami terus peningkatan, dan produksi tahun 2021 mencapai 2.097.013Ton. Sentra Utama Penghasil ubi kayu berada di Kecamatan Terbanggi Besar, Bandar

Mataram, Seputih Agung, Bandar Surabaya, Anak Tuha, Seputih Surabaya

Selain tanaman pangan, Lampung Tengah diproyeksi dapat menjadi sentra buah dan sayuran di Lampung, seperti Cabai, Nanas, Pisang.

Populasi sapi dan kambing Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami peningkatan.

Salah satu program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah Program Sikomandan.

Dan pada tahun 2021, terjadi peningkatan populasi sapi yang signifikan, yaitu lebih dari 10 persen dibandingkan tahun 2020.

4. Pada Misi IV terdapat 9 program dan 3 indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 106,67%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada misi IV dalam kategori sangat baik, dari 9 program tersebut semuanya berperan penting dalam mendukung pencapaian target kinerja dan ini menunjukkan bahwa Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah semakin meningkat.
5. Pada Misi V terdapat 25 program dan 6 indikator kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 94,42%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada misi V dalam kategori sangat baik dan mendukung keberhasilan Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

3.2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2021 alokasi anggaran sebesar Rp. 992.734.655.679,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 807.530.364.867,- dengan capaian 81,34%. Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 129 Program, yang terdapat pada misi 1 samapai dengan misi 5. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan per Misi secara rinci sebagaimana berikut:

Misi I memiliki alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 351.975.774.974,- dan teralisasi sebesar Rp. 275.166.937.334,- dengan capaian 78,18 persen.

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Misi I Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,27	Indeks ..	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	21.650.000,00	21.650.000,00	100,00
				Program Perlindungan Perempuan	222.000.000	221.994.435	99,980
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	60.225.000	60.072.900	99,75
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	49.800.000,00	48.010.800,00	96,41
				Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	222.000.100,00	143.752.894,00	112,87
				Program Perlindungan Khusus Anak	150.000.300,00	149.348.050,00	99,57
	Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi	17,86	Persen	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	843.129.000	836.803.240	99,25

		pada event Nasional (jenis)			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	122.887.500	101.459.500	82,56
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelestarian budaya daerah	Rata-rata lama sekolah (MYS)	9,4	Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	157.909.027.620	133.546.521.320	84,57
		Lama harapan sekolah (EYS)	12,28	Tahun	Program Pendidik dan tenaga pendidik	20.945.056.300	20.751.878.614	99,08
					Program Pembinaan Perpustakaan	511.204.500	496.590.411	97,14
					Program Pengembangan Kebudayaan	762.915.500	720.493.200	94,44
					Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	394.489.300	389.916.110	98,84
3	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan derajat kesehatan	Usia harapan hidup	69,94	Tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	113.084.266.704	73.139.879.109	64,68
		Prevalensi intervensi stunting	12,7	Persen	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.988.448.000	5.232.306.148	87,37
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	397.940.850	279.463.750	70,23
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	43.703.361.999	34.391.653.007	83,67
4	Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Laju pertumbuhan penduduk	0,66	Persen	Program Pengendalian Penduduk	72.865.300,00	72.082.300,00	98,93
					Program Pembinaan Keluarga Berencana	6.405.517.001	4.467.673.942	69,75
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	108.990.000	95.387.604	87,52
JUMLAH						351.975.774.974	275.166.937.334	78,18

Misi II memiliki alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 394.781.811.152,- dan teralisasi sebesar Rp. 315.453.838.722,- dengan capaian 79,91 persen.

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Misi II Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	63,5	Persen	Program Penyelenggaraan Jalan	323.085.797.599,00	256.720.408.025,00	79,46
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten	88,36	Persen	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	264.454.750	113.314.050	42,85
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	83	Persen	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.176.443.116	3.025.545.052	95,25
		Kinerja lalu Lintas Kabupaten/Kota	0,58	v/c	Program Pengelolaan Pelayaran	142.737.500,00	142.221.500,00	99,64
3	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2	94,26	Persen	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	37.813.948.290	32.163.306.242	85,06
4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Jumlah luas kawasan kumuh	52,33	ha	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.461.219.042,00	1.987.927.831,00	80,77
		Rumah tidak layak huni	23,74	Persen	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.488.781.000,00	3.488.781.000,00	100,00
		Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	89,6	Persen	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.696.960.000,00	1.536.491.880,43	90,54

		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	94,44	Persen	Program Penataan Bangunan Gedung	11.152.098.855,00	10.192.016.626,79	91,39
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	134.720.500,00	128.348.000,00	95,27
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	534.330.000,00	453.339.000,00	84,84
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	4.687.675.200,00	4.027.720.760,00	85,92
5	Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan air	58,34	IKA	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	25.000.000	22.467.500,00	89,87
		Indeks kualitas udara	83,98	IKU	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.500.000.000	192.485.500,00	12,83
		Indeks kualitas lahan	26,86	ITL	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	864.212.300,00	804.005.555,00	93,03
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya & Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun (Limbah B3)	30.000.000,00	28.355.700,00	94,52
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	12.500.000,00	12.265.000,00	98,12

					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	30.000.000,00	29.948.000,00	99,83
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	48.750.000,00	40.300.500,00	82,67
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	14.000.000,00	10.943.000,00	78,16
					Program Pengelolaan Persampahan	100.000.000,00	98.833.000,00	98,83
6	Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tata Ruang	78	Persen	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	297.790.000,00	111.350.000,00	37,39
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	33.653.000,00	7.025.000,00	20,87
					Program Penyelesaian ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	3.186.740.000,00	116.440.000,00	3,65
JUMLAH						394.781.811.152	315.453.838.722	79,91

Misi III memiliki alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 21.968.803.190 ,- dan teralisasi sebesar Rp. 19.718.635.219,- dengan capaian 89,76 persen.

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Misi III Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan	Score PPH	86,1	Nilai	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	219.834.000,00	161.776.000,00	73,59

masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB	36,4	Persen	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	503.017.500	436.507.500	86,78
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10	Persen	Program Penanganan Kerawanan Pangan	172.666.000	109.735.000	63,55
	Kontribusi sektor industri pengolahan Non Migas dalam PDRB	22,9	Persen	Program Pengawasan Keamanan Pangan	191.500.000	141.561.500	73,92
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	831.071.500	645.579.300	77,68
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.391.360.000	4.360.968.000	99,31
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	248.990.500,00	237.060.600,00	95,21
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	122.393.000	113.998.000	93,14
				Program Penyuluhan Pertanian	3.350.861.700	2.707.290.600	80,79
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	110.945.500,00	110.616.500,00	99,70
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	234.800.000	234.639.500	99,93
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	12.997.500	12.997.500	100,00
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	310.553.750	310.509.640	99,99
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	578.290.000,00	566.510.633,00	97,96

					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	99.849.000,00	99.616.700,00	99,77
					Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	226.590.000,00	115.152.100,00	50,82
					Program perizinan dan pendaftaran perusahaan			
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.012.809.750	983.651.006	97,12
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	180.308.200	170.063.100	94,32
					Program Pengembangan Ekspor			
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	385.641.000,00	379.846.000,00	98,50
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			
2	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	20	Persen	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	308.420.000,00	308.245.200,00	99,94
					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	68.807.000,00	68.807.000,00	100,00
					Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	55.150.000,00	54.890.000,00	99,53
					Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	31.378.000,00	31.378.000,00	100,00
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	58.130.000,00	58.130.000,00	100,00
					Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	52.455.000,00	52.455.000,00	100,00

					Program Pengembangan UMKM	333.811.000,00	329.166.688,00	98,61
3	Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	7,29	Persen	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.935.148.800	1.712.450.725	88,49
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	384.408.500	381.464.590	99,23
					Program Pemasaran Pariwisata	503.405.000,00	488.953.100,00	97,13
					Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual			
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	294.752.000	285.171.100	96,75
4	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase peningkatan investasi	10	Persen	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	130.158.200,00	121.105.926,00	93,05
					Program Promosi Penanaman Modal	136.705.200,00	132.457.426,00	96,89
					Program Pelayanan Penanaman Modal	134.145.050,00	133.751.927,00	99,71
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	402.761.950,00	332.329.719,00	82,51
					Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	203.837.500,00	203.581.500,00	99,87
5	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung	Indeks Desa Membangun	0,714	Indeks	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.065.625.900	1.042.369.630	97,82
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	328.956.300,00	239.093.300,00	72,68
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	11.987.520	9.600.000	80,08

					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.793.170	5.700.000	83,91
6	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73,48	Persen	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	127.750.000	123.489.500	96,66
					Program Penempatan Tenaga Kerja	216.250.000	203.266.650	94,00
					Program Hubungan Industrial	140.750.000	140.548.000	99,86
7	Meningkatnya penanganan kemiskinan	Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	4	Persen	Program Pemberdayaan Sosial	417.174.400,00	285.484.219,00	68,43
					Program Rehabilitasi Sosial	335.768.000	238.959.000	71,17
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	680.078.800	494.671.840	72,74
					Program Penanganan Bencana	419.717.000,00	343.036.000,00	81,73
JUMLAH						21.968.803.190	19.718.635.219	89,76

Misi IV memiliki alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 15.046.581.740,- dan teralisasi sebesar Rp. 13.933.465.385,- dengan capaian 92,60 persen.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Misi IV Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	0	kejadian	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	173.846.000,00	168.416.690,00	96,88

					Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	265.549.000,00	249.620.265,00	94,00
					Program pembudayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	235.000.000,00	233.352.900,00	99,30
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	38.500.000,00	38.500.000,00	100,00
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	254.557.700,00	242.440.950,00	95,24
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	10	persen	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.935.274.700	1.532.271.200	79,18
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.500.000.000	1.409.944.958	94,00
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	212.427.640	208.300.000	98,06
3	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	72,16	Indeks	Program Penanggulangan Bencana	10.376.632.300	9.806.715.022	94,51
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	54.794.400	43.903.400	80,12
JUMLAH						15.046.581.740	13.933.465.385	92,60

Misi V memiliki alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 208.961.684.623,- dan teralisasi sebesar Rp. 183.257.488.206,- dengan capaian 87,70 persen.

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Misi V Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	predikat	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.555.419.500	3.296.756.743	92,72
		Indeks SPBE	2	indek	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	658.313.400	588.970.039	89,47
	Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	B	predikat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.898.506.600	2.722.422.347	93,93	
	Indek Inovasi Daerah	1.725	indek	Program Perum Daerahusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	763.489.700,00	623.719.700,00	81,69	
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	5.116.668.500,00	5.110.160.311,00	99,87	
				Program Aplikasi Informatika	1.446.000.000,00	1.376.062.139,00	95,16	
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	349.913.000,00	348.556.350,00	99,61	
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	40.000.000,00	39.551.247,00	98,88	
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.305.180.300,00	1.147.962.422,00	87,95	
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.360.531.000	2.142.101.322	90,75	
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.271.720.000	1.220.644.100	95,98	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat				3.668.105.300	2.897.165.395	78,98		

					Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.226.825.100	1.068.988.236	87,13
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	146.773.668.448	133.591.244.753	94,35
2	Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	56	indek	Program Kepegawaian Daerah	2.456.332.975	1.657.235.863	67,47
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.790.824.000	2.596.733.550	93,05
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	85,01	Persen	Program Pencatatan Sipil	1.172.900	1.172.900	100,00
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.633.600	1.259.000	77,07
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	2.059.200,00	1.040.100,00	50,51
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	32.009.718.000	22.638.335.252	70,72
					Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	140.750.000,00	62.554.650,00	44,44
					Program Pengelolaan Arsip	124.853.100,00	124.851.787,00	100,00
JUMLAH PROGRAM						208.961.684.623	183.257.488.206	87,70

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan tolak ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026. Sangat disadari laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Penyempurnaan laporan dimasa yang akan datang akan terus dilakukan agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Secara umum Pencapaian Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 berdasarkan pengukuran kinerja sasaran pada tingkat hasil (*outcomes*) telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keberhasilan pencapaian sasaran ditunjukkan dari pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing sasaran serta ditunjang oleh data-data indikator kinerja makro dari masing-masing sasaran.

Berdasarkan Akuntabilitas Keuangan, alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran juga secara umum dapat terealisasi sesuai

dengan target atau tingkat capaian yang diharapkan. Upaya pencapaian sasaran sesuai Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021, telah diupayakan secara optimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, namun demikian berbagai permasalahan/kendala sering terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga perlu diupayakan jalan keluar/solusi untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Kiranya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 ini, dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan kinerja. Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Perfomance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

4.2. SARAN-SARAN

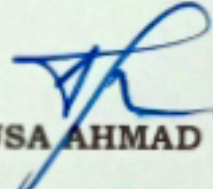
Dari permasalahan yang dihadapi dan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, maka perlu disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemantauan atas pencapaian kinerja di level Perangkat Daerah;

2. Melakukan evaluasi terhadap hasil dan implementasi program, sehingga terjadi keselarasan antara kegiatan, hasil program dengan sasaran strategis pada setiap Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dalam menerapkan manajemen kinerja melalui pengintegrasian system perencanaan kinerja dan penganggaran serta membangun mekanisme sistem pengukuran kinerja organisasi dan individu, sebagai sarana pemantauan kinerja oleh pimpinan dan juga sebagai pemberian *reward and punishment*;
4. Perlu adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan aparatur di Kabupaten Lampung Tengah dengan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada pohon kinerja, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk prioritas pembangunan dan memiliki daya ungkit yang efektif dalam pencapaian kinerja serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

PARAF HIERARKIS	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Bag Organisasi	


MUSA AHMAD

LAMPIRAN

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MISI I

KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender Prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,27	Indeks	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	21.650.000,00
				Program Perlindungan Perempuan	222.000.000
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	60.225.000
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	49.800.000,00
				Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	222.000.100,00
				Program Perlindungan Khusus Anak	150.000.300,00
				Presentase Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	17,86
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	122.887.500	
2 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta	Rata-rata lama sekolah (MYS)	9,4	Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	157.909.027.620
	Lama harapan sekolah (EYS)	12,28	Tahun	Program Pendidik dan tenaga pendidik	20.945.056.300

literasi masyarakat				Program Pembinaan Perpustakaan	511.204.500
dan pelestarian				Program Pengembangan Kebudayaan	762.915.500
budaya daerah				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	394.489.300
3 Meningkatnya aksesibilitas, kualitas	Usia harapan hidup	69,94	Tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	113.084.266.704
dan derajat kesehatan	Prevalensi intervensi stunting	12,7	Persen	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.988.448.000
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	397.940.850
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	43.703.361.999
4 Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan	Laju pertumbuhan penduduk	0,66	Persen	Program Pengendalian Penduduk	72.865.300,00
				Program Pembinaan Keluarga Berencana	6.405.517.001
penduduk dan ketahanan keluarga				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	108.990.000
	JUMLAH PROGRAM			Program : 22	351.975.774.974
	JUMLAH ANGGARAN				

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MISI II

KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	63,5	Persen	Program Penyelenggaraan Jalan	323.085.797.599,00
	Tingkat Aksesibilitas Jalan Kabupaten	88,36	Persen	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	264.454.750
2 Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	83	Persen	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.176.443.116
	Kinerja lalu Lintas Kabupaten/Kota	0,58	v/c	Program Pengelolaan Pelayanan	142.737.500,00
3 Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	Presentase Luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2	94,26	Persen	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	37.813.948.290

4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Jumlah luas kawasan kumuh	52,33	ha	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.461.219.042,00
		Rumah tidak layak huni	23,74	Persen	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.488.781.000,00
		Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan atau aman	89,6	Persen	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.696.960.000,00
		Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan atau aman	94,44	Persen	Program Penataan Bangunan Gedung	11.152.098.855,00
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	134.720.500,00
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	534.330.000,00
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	4.687.675.200,00
5	Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan air	58,34	IKA	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	25.000.000

	Indeks kualitas udara	83,98	IKU	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.500.000.000
	Indeks kualitas lahan	26,86	ITL	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	864.212.300,00
				Program Pengendalian Bahan Berba-haya & Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berba-haya & Beracun (Limbah B3)	30.000.000,00
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	12.500.000,00
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	30.000.000,00
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	48.750.000,00
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	14.000.000,00
				Program Pengelolaan	100.000.000,00

				Persampahan		
6	Meningkatnya kualitas penataan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tata Ruang	78	Persen	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	297.790.000,00
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	33.653.000,00
					Program Penyelesaian ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	3.186.740.000,00
		JUMLAH PROGRAM			Program : 25	394.781.811.152
		JUMLAH ANGGARAN				

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MISI III

KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Score PPH	86,1	Nilai	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	219.834.000,00
	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Perikanan terhadap PDRB	36,4	Persen	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	503.017.500
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10	Persen	Program Penanganan Kerawanan Pangan	172.666.000
	Kontribusi sektor industri pengolahan Non Migas dalam PDRB	22,9	Persen	Program Pengawasan Keamanan Pangan	191.500.000

				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	831.071.500
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.391.360.000
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	248.990.500,00
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	122.393.000
				Program Penyuluhan Pertanian	3.350.861.700
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	110.945.500,00
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	234.800.000
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	12.997.500
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	310.553.750
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	578.290.000,00
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	99.849.000,00

				Kabupaten/Kota		
				Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	226.590.000,00	
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.012.809.750	
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	180.308.200	
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	385.641.000,00	
2	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat	Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	20	Persen	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	308.420.000,00
					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	68.807.000,00
					Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	55.150.000,00
					Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	31.378.000,00
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	58.130.000,00
					Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	52.455.000,00

				Program Pengembangan UMKM	333.811.000,00	
3	Mewujudkan Kemandirian Daerah Yang Didukung Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	7,29	Persen	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.935.148.800
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	384.408.500
					Program Pemasaran Pariwisata	503.405.000,00
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	294.752.000
4	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Persentase peningkatan investasi	10	Persen	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	130.158.200,00
					Program Promosi Penanaman Modal	136.705.200,00
					Program Pelayanan Penanaman Modal	134.145.050,00
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	402.761.950,00
					Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	203.837.500,00
5	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan	Indeks Desa Membangun	0,714	Indeks	Program Administrasi Pemerintahahan Desa	1.065.625.900

masyarakat kampung					
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	328.956.300,00
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	11.987.520
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	6.793.170
6 Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73,48	Persen	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	127.750.000
				Program Penempatan Tenaga Kerja	216.250.000
				Program Hubungan Industrial	140.750.000
7 Meningkatnya penanganan kemiskinan	Persentase penurunan warga miskin (DTKS) Desil 1	4	Persen	Program Pemberdayaan Sosial	417.174.400,00
				Program Rehabilitasi Sosial	335.768.000
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	680.078.800
				Program Penanganan Bencana	419.717.000,00
	JUMLAH PROGRAM			Program : 50	21.968.803.190
	JUMLAH ANGGARAN				

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MISI IV

KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Jumlah kejadian Konflik Sosial	0	kejadian	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	173.846.000,00
				Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	265.549.000,00
				Program pembudayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	235.000.000,00
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	38.500.000,00
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	254.557.700,00

2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Perda	10	persen	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.935.274.700
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.500.000.000
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	212.427.640
3	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	72,16	Indeks	Program Penanggulangan Bencana	10.376.632.300
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	54.794.400
		JUMLAH PROGRAM			Program : 9	15.046.581.740
		JUMLAH ANGGARAN				

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MISI V

KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
 TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	predikat	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.555.419.500
	Indeks SPBE	2	indek	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	658.313.400
	Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	B	predikat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.898.506.600
	Indek Inovasi Daerah	1.725	indek	Program Perum Daerahusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	763.489.700,00
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	5.116.668.500,00
				Program Aplikasi Informatika	1.446.000.000,00
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	349.913.000,00
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk	40.000.000,00

				Pengamanan Informasi		
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.305.180.300,00	
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.360.531.000	
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.271.720.000	
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	3.668.105.300	
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.226.825.100	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	146.773.668.448	
2	Menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	56	indek	Program Kepegawaian Daerah	2.456.332.975
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.790.824.000	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	85,01	Persen	Program Pencatatan Sipil	1.172.900

				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.633.600
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	2.059.200,00
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	32.009.718.000
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	140.750.000,00
				Program Pengelolaan Arsip	124.853.100,00
	JUMLAH PROGRAM				208.961.684.623
	JUMLAH ANGGARAN			Program : 25	